

**IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PULAU-PULAU KECIL  
TERHADAP MASYARAKAT PESISIR DESA LIHUNU, KECAMATAN LIKUPANG,  
KABUPATEN MINAHASA UTARA, PROVINSI SULAWESI UTARA**

**SKRIPSI**

**PROGRAM STUDI SOSIAL EKONOMI PERIKANAN  
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN DAN KELAUTAN**

Oleh :

**PRIMA FARID BUDIANTO**

**0710840034**



**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2012**



IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PULAU-PULAU KECIL  
TERHADAP MASYARAKAT PESISIR DESA LIHUNU, KECAMATAN LIKUPANG,  
KABUPATEN MINAHASA UTARA, PROVINSI SULAWESI UTARA

SKRIPSI

PROGRAM STUDI SOSIAL EKONOMI PERIKANAN  
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN DAN KELAUTAN

Oleh :

**PRIMA FARID B.**  
0710840034

telah dipertahankan didepan penguji  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

SK Dekan No. : \_\_\_\_\_

Tanggal : \_\_\_\_\_

Dosen Penguji I

Dr. Ir. Anthon Efani, MP  
NIP 19650717 199103 1 006  
Tanggal : \_\_\_\_\_

Dosen Penguji II

Dr. Ir. Ismadi, MS  
NIP 19490515 197802 1 001  
Tanggal : \_\_\_\_\_

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing I

Dr. Ir. Edi susilo, MS  
NIP 19591205 198503 1 003  
Tanggal: \_\_\_\_\_

Dosen Pembimbing II

Erlinda Indrayani, S.Pi, M.Si  
NIP 19740220 200312 2 001  
Tanggal: \_\_\_\_\_

Mengetahui,  
Ketua Jurusan

Dr. Ir. Nuddin Harahap, MP  
NIP.19610417 199003 1 001  
Tanggal : \_\_\_\_\_

## PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil penjiplakan maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Malang, 30 Juli 2012

Mahasiswa

Prima Farid Budianto  
NIM. 0710840034



## RINGKASAN

**PRIMA FARID BUDIANTO, Implementasi Pengembangan Pariwisata di Pulau-Pulau Kecil Terhadap Masyarakat Pesisir Desa Lihunu, Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. (Dibawah Bimbingan Dr. Ir. Edi Susilo, MS dan Erlinda Indrayani, S.Pi, M.Si)**

---

Meningkatnya kecenderungan pasar pariwisata internasional untuk berwisata di kawasan yang masih alami memberikan peluang bagi pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil. Selanjutnya, dalam Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.67/UM.001/MKP/2004 tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata di Pulau-Pulau Kecil, disebutkan salah satu prinsip pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil adalah prinsip partisipasi masyarakat. Dijelaskan bahwa proses pelibatan masyarakat baik secara aktif maupun pasif harus dimulai sejak tahap perencanaan hingga tahap pengelolaan dan pengembangan. Salah satu wilayah pulau kecil di Indonesia yang kaya akan sumber daya lautnya adalah Desa Lihunu, Pulau Bangka Kecamatan Likupang Timur yang berbatasan dengan Pulau Gangga dan Pulau Talise Kecamatan Likupang Barat. Daya tarik utama Desa Lihunu adalah keindahan pantai dengan pasir berwarna putih bersih, keindahan laut dan panorama sekitar untuk berbagai atraksi wisata alam dan wisata bahari seperti rekreasi pantai, memancing, berperahu, berenang, dan menyelam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. KM 67/UM 001/MKP/2004 terhadap masyarakat pesisir di Desa Lihunu-Pulau Bangka Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa Utara. Mengetahui dan menganalisis pengembangan perikanan di Desa Lihunu-Pulau Bangka, Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa Utara dengan pengelolaan melalui konsep kepariwisataan mengacu pada Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2004 tersebut. Serta mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat yang dialami dalam pengembangan sumber daya pesisir di Desa Lihunu-Pulau Bangka, Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa Utara

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di wilayah Desa Lihunu, Pulau Bangka Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Dan waktu pelaksanaannya pada Bulan Oktober sampai dengan November 2011. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan subjektivitas bersifat mikro sampai makro.

Mata pencaharian masyarakat lokal yang bermukim di Pulau Bangka sebagian besar utamanya adalah nelayan. Namun tidak sedikit pula yang mengelola perkebunan dan lahan pertanian yang lain. Semua potensi yang dimiliki Pulau Bangka khususnya wilayah Desa Lihunu dimanfaatkan dalam bidang perikanan dan dikembangkan ke arah sektor pariwisata. Potensi alam di Desa Lihunu meliputi kondisi pantai dan pasir, kondisi perairan dan ombak, kondisi terumbu karang dan bebatuan, serta kondisi flora dan fauna.

Di Desa Lihunu terdapat beberapa kondisi pantai yang memiliki keindahan yang unik dibandingkan dengan pantai lain. Pantai-pantai tersebut adalah Pantai Sabora, Pantai Totohe, Pantai Sahaung, Pantai Panjang, Pantai Kalipepu, dan Pantai Sengkamau. Wilayah Desa Lihunu memiliki perairan yang tenang dan

berombak tidak terlalu kencang. Hanya pada saat tertentu pada bulan Desember-Februari saat musim/angin barat kondisi ombak cukup kencang. Perairan yang berombak tenang di wilayah pesisir desa Lihunu sangat menunjang untuk *fishing ground* ikan-ikan karang. Dengan kondisi perairan tenang dan kualitas yang masih baik, yang dibuktikan dengan mudahnya nelayan mendapatkan tangkapan berupa ikan-ikan karang dengan menggunakan peralatan tradisional, hal ini membuktikan pula bahwa kondisi tersebut mendukung keberadaan, bertumbuh dan berkembangnya terumbu karang dalam perairan di wilayah pesisir Desa Lihunu. Kondisi bebatuan di permukaan perairan di Pulau Bangka yang masuk dalam wilayah administratif Desa Lihunu memiliki kenampakan yang unik dan mempesona.

Meskipun termasuk dalam wilayah pesisir, namun sebagian besar wilayah Desa Lihunu merupakan tanah yang subur untuk lahan pertanian. Vegetasi yang dapat tumbuh di wilayah ini tidak hanya didominasi oleh satu jenis tanaman saja. Di wilayah daratan, di wilayah Desa Lihunu yang berbatasan langsung dengan hutan alami memiliki potensi fauna yang beraneka ragam yang dapat dijadikan alternatif selain usaha perikanan, namun belum dikembangkan ke arah sektor pariwisata. Salah satu diantaranya adalah keberadaan rusa Bangka. Selain rusa, fauna khas Sulawesi yang terkenal yaitu kuskus masih dapat dijumpai di pedalaman hutan alami di wilayah Desa Lihunu. Daya tarik lainnya di Desa Lihunu sebagai destinasi wisata tentu tidak lain adalah pemandangan bawah lautnya.

Pada kondisi masyarakat sebagai nelayan, sumber daya manusia sebagai *stakeholder* utama pengelola sumber pesisir Desa Lihunu telah berhasil mengelola wilayahnya dengan sangat baik. Pada sektor pariwisata, masyarakat di Desa Lihunu menunjukkan bahwa secara kuantitas sumber daya manusia di tempat ini sangat menunjang untuk kegiatan pengembangan pariwisata, namun ditinjau dari segi kualitas dan kemampuan aktualisasi diri serta partisipasinya, masih rendah.

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang belum optimal dan maksimal terutama pada sektor pariwisata, dengan cara memberikan pelatihan peningkatan keterampilan dan mempermudah akses pendidikan formal yang dilakukan oleh instansi terkait, seperti DKP dan Disbudpar secara langsung, serta meningkatkan sinkronisasi Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata di Pulau-Pulau Kecil dan undang-undang tentang kepariwisataan dengan otonomi daerah yang harus dilakukan oleh lembaga pemerintahan di daerah.

Dengan turunnya Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2004 berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Desa Lihunu, menjadi lebih baik secara ekonomi, sosial, serta budaya masyarakat. Pengaruh paling nyata adalah mulainya pengembangan perikanan di Desa Lihunu yang dilakukan dengan pengelolaan melalui konsep kepariwisataan, yaitu kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan tidak hanya dengan penangkapan dan budidaya, tetapi lebih diarahkan pada kegiatan menjual jasa untuk wisata menyelam (*diving*).

Kuantitas sumber daya manusia, serta program-program instansi terkait menjadi daya dukung dalam pengembangan perikanan dengan konsep pariwisata (*minawisata*). Sedangkan rendahnya kualitas sumber daya manusia terutama minimnya keterampilan yang dimiliki masyarakat lokal, menjadi faktor penghambat belum dapat berjalannya pengembangan potensi-potensi pesisir yang terdapat di Desa Lihunu.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrohiim. Alhamdulillah robbil 'alamiin.* Banyak manfaat yang diperoleh dari pengelolaan wilayah pesisir. Baik pada sektor perikanan maupun pengembangan sektor pariwisata. Selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, pengembangan pesisir sangat signifikan berpengaruh terhadap pendapatan daerah khususnya maupun pendapatan negara pada umumnya.

Penelitian ini berusaha untuk memberikan sumbangan keilmuan dan langkah awal bagi upaya meningkatkan kualitas masyarakat lokal dalam pengelolaan pesisir, serta memperbesar intensitas keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pesisir (berbasis masyarakat).

Laporan penelitian ini ditulis untuk menyampaikan semua potensi yang ada pada wilayah pesisir Desa Lihunu, Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara yang kemudian dianalisis dan menghasilkan suatu kajian teoritik dasar. Selai itu pula menganalisis pengaruh dari turunnya Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2004 tentang pengembangan pulau-pulau kecil, terhadap masyarakat lokal Desa Lihunu. Disamping menganalisis faktor yang berpengaruh mendukung dan menghambat pengembangan pesisir Desa Lihunu.

Penulis menyampaikan rasa syukur ke hadirat Allah SWT serta terima kasih kepada semua pihak yang membantu terselesaikannya laporan ini. Terkhusus kepada Bapak Dr. Ir. Edi Susilo, MS selaku pembimbing I penasehat akademik yang dengan sabar dan penuh perhatian membimbing penyelesaian laporan ini. Serta kepada Ibu Erlinda Indrayani, S.Pi, M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan masukan serta dorongan demi terselesaikannya laporan ini. Akhir kata, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi kualitas laporan ini lebih baik pada masa yang akan datang. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan segala manfaat dan langkah ini memperoleh ridho Allah SWT.

Malang, Agustus 2012

Penulis

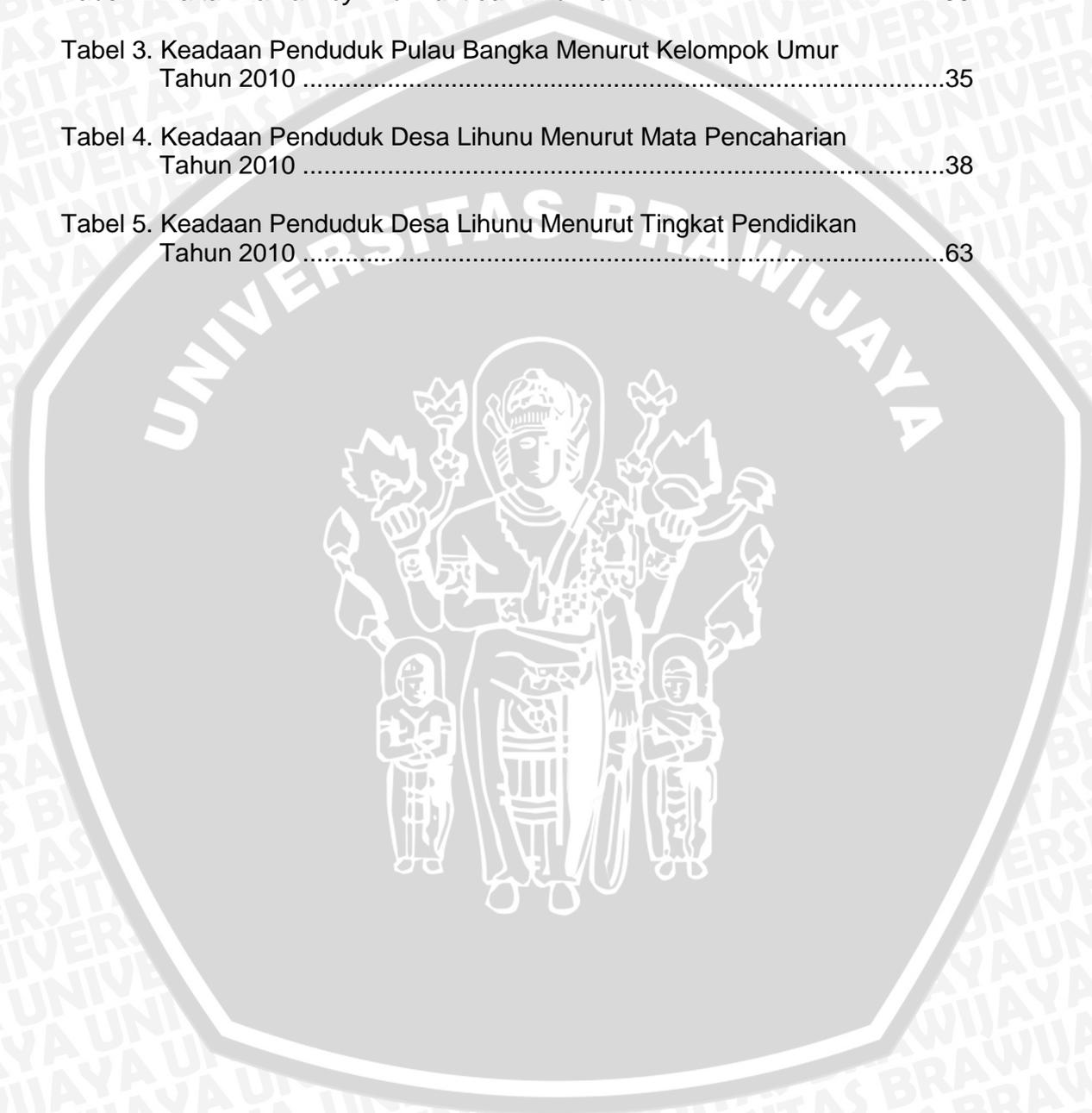
## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	iii
<b>RINGKASAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>1. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Permasalahan.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
<b>2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	7
2.1 Definisi Pulau-Pulau Kecil.....	7
2.2 Pengertian Sumber Daya Alam Menurut Undang-Undang.....	8
2.3 Definisi Pengelolaan Sumber Daya Alam.....	9
2.4 Masyarakat Pesisir.....	10
2.5 Sosial, Budaya, dan Ekonomi Masyarakat Pesisir.....	11
2.4.1 Sosial Masyarakat Pesisir.....	11
2.4.2 Budaya Masyarakat Pesisir.....	13
2.4.3 Ekonomi Masyarakat Pesisir.....	15
2.6 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Sumber Daya Manusia.....	16
2.6.1 Pengembangan Sumber Daya Manusia.....	16
2.6.2 Manajemen Sumber Daya Manusia.....	17
2.7 Pariwisata.....	18
2.8 Kerangka Berpikir Penelitian.....	21

<b>3. METODE PENELITIAN</b> .....	24
3.1 Lokasi dan Waktu.....	24
3.2 Obyek Penelitian .....	25
3.3 Metode Penelitian.....	25
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	26
3.5 Penentuan Responden.....	29
3.6 Analisis Data dan Kerangka Analisis Data.....	31
3.6.1 Analisis Data .....	31
3.6.2 Kerangka Analisis Data .....	33
<b>4. HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	34
4.1 Masyarakat Pesisir Pulau Bangka .....	34
4.2 Desa Lihunu .....	36
4.3 Potensi Alam/Fisik Desa Lihunu .....	39
4.3.1 Kondisi Pasir dan Pantai.....	42
4.3.2 Kondisi Perairan dan Ombak.....	48
4.3.3 Kondisi Terumbu Karang dan Bebatuan .....	50
3.6.1 Kondisi Flora dan Fauna.....	53
4.4 Sumber Daya Manusia .....	58
4.4.1 Kemampuan Masyarakat dalam Berusaha .....	59
4.4.2 Pendidikan Masyarakat .....	61
4.5 Sosial, Budaya, dan Ekonomi Masyarakat Lihunu .....	65
4.6 Kebijakan Perikanan di Kabupaten Minahasa Utara.....	75
4.6.1 Rencana strategi .....	77
4.6.2 Program Dinas dan Instansi Terkait.....	79
4.7 Faktor Pendukung dan Penghambat .....	83
<b>5. KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	85
5.1 Kesimpulan .....	85
5.2 Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	87

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kategori Data dan Konsep Penelitian .....	26
Tabel 2. Daftar Nama <i>Key informant</i> dan <i>Informant</i> .....	30
Tabel 3. Keadaan Penduduk Pulau Bangka Menurut Kelompok Umur Tahun 2010 .....	35
Tabel 4. Keadaan Penduduk Desa Lihunu Menurut Mata Pencaharian Tahun 2010 .....	38
Tabel 5. Keadaan Penduduk Desa Lihunu Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2010 .....	63

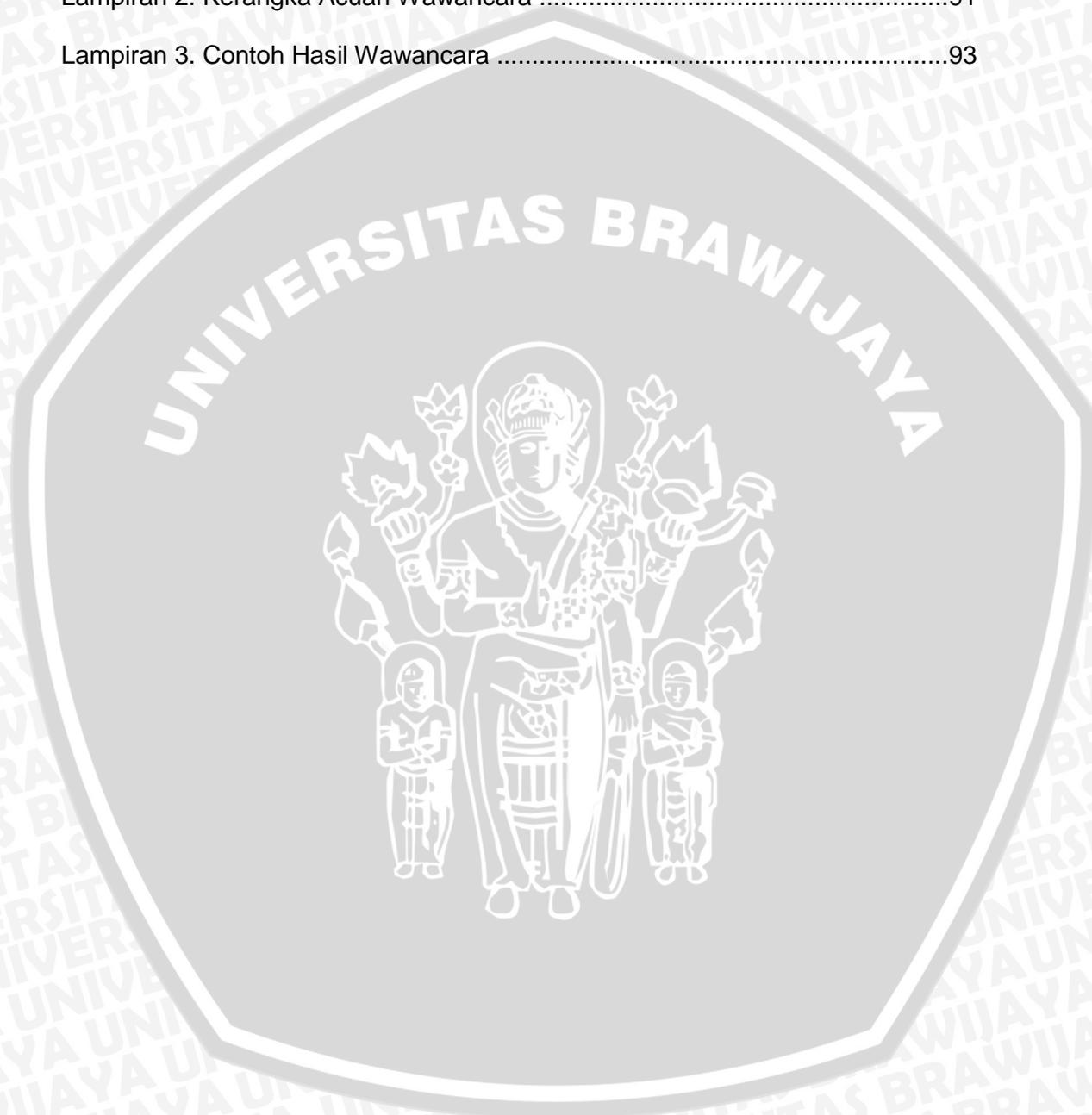


## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Konsep Penelitian .....	22
Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian .....	23
Gambar 3. Komponen-komponen Analisis Data.....	30
Gambar 4. Kerangka Analisis Pengaruh Pengembangan Pariwisata Terhadap Masyarakat Lokal Desa Lihunu.....	31
Gambar 5. Peta lokasi Desa Lihunu.....	34
Gambar 6. Pantai Sabora .....	43
Gambar 7. Pantai Totohe .....	44
Gambar 8. Pantai Sahaung.....	45
Gambar 9. Pantai Panjang .....	46
Gambar 10. Pantai Kalipepu.....	47
Gambar 11. Pantai Sengkamau .....	48
Gambar 12. Perairan Dangkal di Pesisir Desa Lihunu.....	49
Gambar 13. Kondisi Ombak di Pesisir Desa Lihunu.....	50
Gambar 14. Kondisi Terumbu Karang di Perairan Pulau Bangka.....	51
Gambar 15. Keberadaan ikan karang pada ekosistem terumbu karang di perairan Pulau Bangka.....	51
Gambar 16. Tekstur Batu Gosoh.....	52
Gambar 17. a). Pohon kelapa, b). Kopra, c). Jambu mete, d). <i>Bulu</i> (bambu), dan e). <i>Mangrove</i> .....	55
Gambar 18. a). Rusa dan b). Kuskus.....	56
Gambar 19. a). <i>Damsel fish</i> , b). <i>Surgeon fish</i> , c). <i>Trigger fish</i> , d). Ikan bubara, e). Kakap merah, f). Dugong, dan g). <i>Igi</i> (bubu).....	58
Gambar 20. Pesta Adat <i>Tulude</i> .....	72

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan .....	89
Lampiran 2. Kerangka Acuan Wawancara .....	91
Lampiran 3. Contoh Hasil Wawancara .....	93



## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang.

Indonesia merupakan negara kepulauan, dengan lebih kurang 17.000 pulau dan panjang pantai sekitar 81.000 km yang merupakan pantai terpanjang di dunia. Jumlah penduduk Indonesia yaitu 200 juta jiwa dan 60% nya hidup di pesisir pantai. Sebagai wilayah tropis perairan laut Indonesia mempunyai keanekaragaman hayati yang cukup tinggi seperti hutan mangrove, terumbu karang, ikan, mamalia (paus, duyung, lumba-lumba), reptile dan berbagai jenis *mollusca*. Kesemua sumber daya alam laut tersebut merupakan salah satu modal dasar yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan nasional (Supriharyono, 2000).

Bengen (2002) dalam Tantu (2011) menyebutkan bahwa wilayah pesisir merupakan situs strategis dimana umat manusia memanfaatkan sumber daya yang melimpah dari lingkungan darat dan laut. Wilayah ini didefinisikan sebagai wilayah dimana daratan berbatasan dengan laut, batas di daratan meliputi daerah-daerah yang tergenang air maupun yang tidak tergenang air dan masih dipengaruhi oleh proses-proses laut seperti pasang surut, angin laut, dan intrusi air laut, sedangkan batas di laut ialah daerah-daerah yang dipengaruhi oleh proses-proses alami di daratan seperti sedimentasi dan aliran air tawar ke laut, serta daerah-daerah laut yang dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan manusia di daratan.

Meningkatnya kecenderungan pasar pariwisata internasional untuk berwisata di kawasan yang masih alami memberikan peluang bagi pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil. Kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap upaya pemeliharaan dan kelestarian lingkungan berdampak pada perlunya pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan memperhatikan lingkungan yang lebih luas.

Selanjutnya, dalam Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.67/UM.001/MKP/2004 tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata di Pulau-Pulau Kecil (Anonymous, 2004), disebutkan salah satu prinsip pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil adalah prinsip partisipasi masyarakat. Dijelaskan bahwa proses pelibatan masyarakat baik secara aktif maupun pasif harus dimulai sejak tahap perencanaan hingga tahap pengelolaan dan pengembangan. Hal ini akan menumbuhkan tanggung jawab dan rasa memiliki yang akan menentukan keberhasilan dan keberlanjutan pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil.

Salah satu wilayah pulau kecil di Indonesia yang kaya akan sumber daya lautnya adalah Pulau Bangka Kecamatan Likupang Timur yang berbatasan dengan Pulau Gangga dan Pulau Talise Kecamatan Likupang Barat. Luas seluruh wilayah Pulau Bangka 2.729 ha dengan jumlah penduduk 2.649 jiwa dan jumlah kepala keluarga 724 KK tersebar di tiga desa yaitu Desa Lihunu, Desa Kahuku, dan Desa Libas (Anonymous, 2009). Secara fisiografis, Pulau Bangka merupakan daerah pesisir yang memiliki bentanglahan pesisir (*coastal landscape*) baik daratan pesisir maupun laut pesisir dengan keindahan panorama sekitarnya yang memiliki daya tarik untuk dikembangkan sebagai destinasi pariwisata. Seperti halnya di desa-desa pesisir umumnya, sebagian daratan pesisir di Pulau Bangka telah dimanfaatkan untuk lokasi permukiman penduduk, lokasi budidaya perikanan (keramba), lokasi aktivitas nelayan, dan lokasi pengembangan wisata.

Daya tarik utama objek-objek wisata tersebut adalah keindahan pantai dengan pasir berwarna putih bersih, keindahan laut dan panorama sekitar untuk berbagai atraksi wisata alam dan wisata bahari seperti rekreasi pantai, memancing, berperahu, berenang, dan menyelam.

Sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lainnya; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.

Kenyataan bahwa wilayah pesisir yang dinamis, memerlukan suatu pengelolaan wilayah yang spesifik untuk dapat mengakomodasi semua kepentingan manusia dan kelestarian lingkungan. Pengelolaan wilayah pesisir harus dapat mengakomodasi berbagai kepentingan *stakeholder* sekaligus memperhatikan potensi dan kemampuan lingkungan wilayah pesisir sebagai ekosistem yang berkelanjutan tanpa mengurangi hak manusia dan komunitas lainnya untuk hidup di dalamnya.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka dengan usulan skripsi ini dilakukan penelitian dan berusaha untuk mendeskripsikan pengaruh yang terjadi pada masyarakat pesisir atas pengembangan wilayah pesisir. Dengan judul Implementasi Pengembangan Pariwisata di Pulau-Pulau Kecil Terhadap Masyarakat Pesisir Desa Lihunu, Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara.

## **1.2 Rumusan Permasalahan**

Perkembangan pariwisata dunia telah melahirkan bentuk pariwisata baru yang berorientasi pada sumber daya alam atau keindahan alam dan potensi *culture* masyarakat perikanan lokal. Bentuk wisata seperti ini lebih dikenal dengan ekowisata dan wisata budaya, lahir karena perubahan dan perkembangan ekonomi

dunia khususnya di negara – negara maju yang memicu perubahan gaya hidup dan cara pandang masyarakat serta kemajuan di bidang teknologi informasi dan transportasi yang menyebabkan motif melakukan perjalanan adalah untuk mencari tantangan dan ilmu pengetahuan, dan salah satu tempat yang potensial adalah Kecamatan Likupang, tepatnya di Desa Lihunu, Pesisir Pulau Bangka.

Perikanan melalui konsep kepariwisataan di Desa Lihunu-Pulau Bangka, Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa Utara merupakan sektor yang masih berpeluang untuk dikembangkan lebih baik lagi. Potensi wisata alam, wisata bahari, dan wisata budaya masih dapat dikembangkan lebih optimal dengan memanfaatkan kekayaan alam bahari di Pulau Bangka. Masyarakat pesisir yang bermukim di Desa Lihunu-Pulau Bangka Kecamatan Likupang Kabupaten Minahasa Utara merupakan masyarakat perikanan yang masih memiliki kearifan lokal dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan di kawasan tersebut.

Hal ini didukung dengan terbitnya Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. KM 67/UM 001/MKP/2004 yang menegaskan bahwa pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil adalah prinsip partisipasi masyarakat, dalam hal ini di Desa Lihunu-Pulau Bangka adalah masyarakat pesisir. Dalam pelaksanaannya peraturan atau keputusan ini ditanggungjawabkan pada aparat pemerintah daerah dan instansi terkait. Sesuai dengan berlakunya Undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, setiap daerah diwajibkan untuk dapat mengembangkan dan mengelola potensi daerahnya masing-masing. Pemerintah Pusat memiliki tanggung jawab dalam menyiapkan kebijakan makro sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah.

Dengan berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh penerapan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. KM 67/UM 001/MKP/2004 terhadap masyarakat pesisir di Desa Lihunu-Pulau Bangka, Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa Utara?
2. Bagaimana pengembangan perikanan di Desa Lihunu-Pulau Bangka, Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa Utara dengan pengelolaan melalui konsep kepariwisataan mengacu pada Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. KM 67/UM 001/MKP/2004?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dialami dalam pengelolaan sumber daya pesisir di Desa Lihunu-Pulau Bangka, Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa Utara?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

- a. Pengaruh penerapan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. KM 67/UM 001/MKP/2004 terhadap masyarakat pesisir di Desa Lihunu-Pulau Bangka Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa Utara.
- b. Pengembangan perikanan di Desa Lihunu-Pulau Bangka, Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa Utara dengan pengelolaan melalui konsep kepariwisataan mengacu pada Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. KM 67/UM 001/MKP/2004.
- c. Faktor pendukung dan penghambat yang dialami dalam pengembangan sumber daya pesisir di Desa Lihunu-Pulau Bangka, Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa Utara

#### 1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

1. Peneliti

Sebagai penambah wawasan, pengetahuan dan sebagai bahan untuk penelitian lebih lanjut.

2. Peguruan tinggi dan kalangan akademis

Sebagai bahan referensi sehingga bisa digunakan sebagai referensi dasar untuk penelitian lebih lanjut.

3. Pemerintah dan Instansi terkait

Sebagai bahan untuk pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

4. Masyarakat

Sebagai salah satu media untuk memberikan pandangan dan membuka pola pikir terutama masyarakat lokal dalam rangka pengembangan potensi-potensi perikanan yang ada di lokasi penelitian.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Definisi Pulau-pulau Kecil

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki 17,480 pulau dengan panjang garis pantai 95,181 km. Tidak heran jika sebanyak 440 kabupaten/kota dari total 495 kabupaten/kota di seluruh Indonesia berada di wilayah pesisir (Data KKP 2008) (Anonymous, 2011).

Pulau-pulau kecil menyediakan sumber daya alam yang produktif untuk dapat dikembangkan misalnya terumbu karang, padang lamun (*sea grass*), hutan *mangrove*, perikanan, dan kawasan konservasi serta menjadi faktor penting dalam menggerakkan pariwisata bahari. Akan tetapi melihat realitas yang ada saat ini, kekayaan alam maupun pulau-pulau kecil rentan kerusakan, baik itu dari alam maupun akibat tindakan manusia, seperti pencemaran, perusakan ekosistem, dan penangkapan ikan secara berlebihan (*overfishing*) (Kusumo, 2010).

Di satu pihak, ketersebaran pulau-pulau kecil yang terbentang mulai Merauke sampai Sabang itu menimbulkan kendala serius dalam melaksanakan percepatan pembangunan kawasan itu agar tidak tertinggal dibandingkan pulau-pulau besar di dekatnya atau semakin terisolir sebagai akibat belum 'tersentuh' akses perhubungan laut dan udara yang sifatnya reguler (Mawardi, 2007).

Indonesia memiliki aset kekayaan alam yang luar biasa melimpah baik hayati maupun non-hayati. Kekayaan tersebut memungkinkan adanya pertumbuhan ekonomi yang pesat khususnya bersumber dari kekayaan tersebut, jika ditangani dengan optimal baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Kusumo, 2010).

## 2.2 Pengertian Sumber Daya Alam Menurut Undang-Undang

Menurut beberapa undang-undang yang berlaku di Indonesia, definisi sumber daya alam yaitu :

a) Undang-Undang No. 5 tahun 1990

Sumber daya alam hayati adalah unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya ala hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem (Pasal 1 ayat 1)

b) Undang-Undang No. 41 tahun 1999

Hasil hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan (Pasal 1 ayat 13).

c) Undang-Undang No.27/2007

Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lainnya; sumberdaya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumberdaya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir (Pasal 1 ayat 4).

### 2.3 Definisi Konsep Pengelolaan Sumber Daya Alam

Menurut beberapa undang-undang yang berlaku di Indonesia, konsep pengelolaan yaitu :

a). Undang-Undang No. 5 tahun 1990

Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

b) Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu (Pasal 1 ayat 1).

c) Undang-Undang No.27/2007

- Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antar sektor, antar pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Pasal 1 ayat1)
- Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 5).

## 2.4 Masyarakat Pesisir

Populasi masyarakat pesisir didefinisikan sebagai sekelompok orang yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya berganrung secara langsung pada pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir. Definisi inipun bisa juga dikembangkan lebih jauh karena pada dasarnya banyak orang yang hidupnya bergantung pada sumber daya laut. Mereka terdiri dari nelayan pemilik, buruh nelayan, pembudidaya ikan dan organisme laut lainnya, pedagang ikan, pengolah ikan, supplier faktor sarana produksi perikanan. Dalam bidang non-perikanan masyarakat pesisir bisa terdiri dari penjual jasa pariwisata, penjual jasa transportasi, serta kelompok masyarakat lainnya yang memanfaatkan sumber daya non-hayati laut dan pesisir untuk menyokong kehidupannya (Nijikuluw, 2001).

Reksowardoyo (1983) dalam Winata (2010) mengemukakan, karakteristik individu adalah sifat-sifat yang ditampilkan seseorang yang berhubungan dengan semua aspek kehidupannya di dunia atau lingkungan sendiri. Mengenali karakteristik masyarakat pesisir sebagai individu sangat penting karena masyarakat pesisir adalah pelaku utama dalam penerapan strategi konservasi sumberdaya laut. Lebih lanjut Fahrudin dan Yulianto (2008) dalam Winata (2010) mengatakan bahwa karakteristik sosial ekonomi masyarakat pesisir dapat dilihat dari faktor mata pencaharian dan lingkungan pemukiman. Mata pencaharian sebagian besar penduduk di wilayah pesisir adalah di sektor pemanfaatan sumberdaya kelautan (*marine resources base*), seperti nelayan, petani ikan (budidaya tambak dan laut), penambangan pasir, kayu mangrove dan lain-lain. Sebagian besar penduduk wilayah pesisir memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Lingkungan pemukiman masyarakat pesisir, khususnya nelayan masih belum tertata dengan baik dan terkesan kumuh.

## **2.3 Sosial, Budaya, dan Ekonomi Masyarakat Pesisir**

### **2.3.1 Sosial Masyarakat Pesisir**

Secara kebahasaan nama sosiologi berasal dari kata *socious*, yang artinya "kawan" atau "teman" dan *logos*, yang artinya "kata", "berbicara", atau "ilmu". Sosiologi berarti berbicara atau ilmu tentang kawan. Dalam hal ini, kawan memiliki arti yang luas, tidak seperti dalam pengertian sehari-hari, yang mana kawan hanya digunakan untuk menunjuk hubungan di antara dua orang atau lebih yang berusaha atau bekerja bersama. Kawan dalam pengertian ini merupakan hubungan antar-manusia, baik secara individu maupun kelompok, yang meliputi seluruh macam hubungan, baik yang mendekatkan maupun yang menjauhkan, baik yang menuju kepada bentuk kerjasama maupun yang menuju kepada permusuhan. Jadi, sosiologi adalah ilmu tentang berbagai hubungan antar-manusia yang terjadi di dalam masyarakat. Hubungan antar-manusia dalam masyarakat disebut hubungan sosial (Santosa, 2010).

Menurut Soekanto (2003), Selo Sumardjan dan Soelaeman Soemardi menyatakan sosiologi atau ilmu masyarakat ialah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses – proses sosial, termasuk perubahan – perubahan sosial. Selanjutnya menurut Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur – unsur sosial yang pokok yaitu kaidah – kaidah sosial (norma – norma sosial), lembaga – lembaga sosial, kelompok – kelompok serta lapisan – lapisan sosial. Proses sosial adalah pengaruh timbal balik antara segi kehidupan ekonomi dengan segi kehidupan politik, antara segi kehidupan hukum dan segi kehidupan agama, antara segi kehidupan agama dan segi kehidupan ekonomi, dan lain sebagainya. Salah satu proses sosial yang

bersifat tersendiri ialah dalam hal terjadinya perubahan – perubahan dalam struktur sosial.

Dalam interaksi intern masyarakat dalam satu etnis telah menimbulkan proses sosial dalam masyarakat itu sendiri. Geertz dalam Mubyarto *et.al.* (1993) mencatat di Indonesia terdiri dari kurang lebih 300 etnik (suku bangsa) dengan kebudayaannya sendiri-sendiri, dengan 250 bahasa daerah yang berbeda. Sebagian suku mendiami kawasan sekitar hutan, yang mengandalkan hidup sebagai petani ladang berpindah atau menggantungkan diri dengan memungut hasil hutan yang menyebabkan mereka hidup terisolasi. Sebagian pula bahkan dalam kuantitas besar masyarakat tinggal dan hidup di daerah pantaidan pesisir, dengan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya yang tidak lepas dari laut (nelayan). Kondisi geografis ekologis desa pesisir mempengaruhi aktivitas ekonomi di dalamnya (Hamzah *et.al.*, 2008).

Para nelayan tidak selalu mempunyai relasi sosial yang harmonis, baik dengan sesama nelayan maupun dengan pihak-pihak lain yang bukan nelayan. Seperti di berbagai tempat lain di dunia, di Indonesia konflik antar nelayan maupun antara nelayan dengan non-nelayan cukup sering terjadi. Mengingat ketersediaan sumber daya perikanan laut (tangkap) yang kian hari kian berkurang, atau dengan kata lain semakin langka, maka dapat diperkirakan bahwa intensitas konflik sosial di kalangan kaum nelayan di Indonesia ke depan akan semakin meningkat. Mencermati kondisi perikanan seperti itu, maka sangatlah urgen untuk melakukan berbagai upaya untuk mengelola konflik di kalangan kaum nelayan, agar konflik tersebut tidak bersifat destruktif (Kinseng, 2007).

### 2.3.2 Budaya Masyarakat Pesisir

Kata kebudayaan berasal dari (bahasa sansekerta) *buddhayah* yang merupakan bentuk jamak dari kata *buddhi* yang berarti budi atau akal. Kebudayaan diartikan sebagai hal – hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. Adapun istilah *culture* yang merupakan istilah bahasa asing yang sama artinya dengan kebudayaan, berasal dari kata Latin *colere*. Artinya mengolah atau mengerjakan, yaitu mengolah tanah atau bertani. Dari asal arti tersebut yaitu *colere* kemudian *culture*, diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam (Soekanto, 2003).

Arti kata budaya secara etimologis menurut kamus Bahasa Indonesia, kata budaya berasal dari bahasa Sansekerta *Bodhya* yang berarti akal budi, sinonimnya adalah kultur yang berasal dari bahasa Inggris *Culture* atau *Cultuur* dalam Bahasa Belanda. Kata *Culture* sendiri berasal dari bahasa Latin *Colere* (dengan akar kata “*Calo*” yang berarti mengerjakan tanah, mengolah tanah atau memelihara ladang dan memelihara hewan ternak. Arti Kata Budaya secara terminologis budaya adalah suatu hasil dari budi dan atau daya, cipta, karya, karsa, pikiran dan adat istiadat manusia yang secara sadar maupun tidak, dapat diterima sebagai suatu perilaku yang beradab. Dikatakan membudaya bila kontinu, konvergen.

Geertz (1981) dalam Moeis (2008) menyatakan, demikian luasnya wilayah laut di Indonesia sehingga mendorong masyarakat yang hidup di sekitar wilayah laut memanfaatkan sumber kelautan sebagai tumpuan hidupnya. Ketergantungan masyarakat terhadap sektor kelautan ini memberikan identitas tersendiri sebagai masyarakat pesisir dengan pola hidup yang dikenal sebagai *kebudayaan pesisir* .

Sedangkan Ginkel (2007) dalam Kusnadi (2010) menyatakan sebagai suatu kesatuan sosial, masyarakat nelayan hidup, tumbuh, dan berkembang di wilayah

pesisir atau wilayah pantai. Dalam konstruksi sosial masyarakat di kawasan pesisir, masyarakat nelayan merupakan bagian dari konstruksi sosial tersebut, meskipun disadari bahwa tidak semua desa-desa di kawasan pesisir memiliki penduduk yang bermatapencaharian sebagai nelayan. Walaupun demikian, di desa-desa pesisir yang sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai nelayan, petambak, atau pembudidaya perairan, kebudayaan nelayan berpengaruh besar terhadap terbentuknya identitas kebudayaan masyarakat pesisir secara keseluruhan. Baik nelayan, petambak, maupun pembudidaya perairan merupakan kelompok-kelompok sosial yang langsung berhubungan dengan pengelolaan sumber daya pesisir dan kelautan.

Koentjaraningrat (1990) dalam Moeis (2008) menyatakan secara ekologis, masyarakat pesisir mempunyai cara kehidupan yang bervariasi, sekurangnya mereka mempunyai alternatif pemanfaatan dua lingkungan hidup : dataran (tanah) dan lautan (air); pada bentuk masyarakat ini, komoditi ekonomi lain selain dari aspek kelautan (mencari ikan dan sumber-sumber alam pantai) merupakan matapencaharian tambahan, sedangkan pada masyarakat petani darat keadaan ini berlaku sebaliknya, yaitu sektor perikanan adalah sebagai bentuk matapencaharian tambahan.

Keesing (1989) dalam Kusnadi (2010) menyatakan bahwa bagi masyarakat nelayan, kebudayaan merupakan sistem gagasan atau sistem kognitif yang berfungsi sebagai "pedoman kehidupan", referensi pola-pola kelakuan sosial, serta sebagai sarana untuk menginterpretasi dan memaknai berbagai peristiwa yang terjadi di lingkungannya. Setiap gagasan dan praktik kebudayaan harus bersifat fungsional dalam kehidupan masyarakat. Jika tidak, kebudayaan itu akan hilang dalam waktu yang tidak lama. Kebudayaan haruslah membantu kemampuan

survival masyarakat atau penyesuaian diri individu terhadap lingkungan kehidupannya.

### 2.3.3 Ekonomi Masyarakat Pesisir

Secara historis istilah ekonomi berasal dari Yunani yaitu *oikos* dan *oikonomia*, yang merujuk pada rumah tangga inti. *Oikos* dalam masa lalu dapat dikategorikan sebagai unit basis sistem sosial, dimana rumah tangga merupakan ekonomi, budaya, dan lembaga politik, dan kepemilikan laki-laki merupakan pondasi politik dan otoritas kekuasaan *patriarchal*. Dalam Holton (1992) menyatakan bahwa kaitannya dengan perjuangan materi dan urgensi kehidupan sehari-hari, pertanyaan-pertanyaan ekonomi yang timbul adalah bagaimana cara kita memahami struktur dan dinamika kehidupan sosial, dan pada perdebatan mengenai penataan ekonomi seperti apa yang paling baik untuk kesejahteraan manusia (Nasution, 2008).

Potensi ekonomi sumber daya pada sektor perikanan diperkirakan mencapai US\$ 82 miliar per tahun. Potensi tersebut meliputi: potensi perikanan tangkap sebesar US\$ 15,1 miliar per tahun, potensi budidaya laut sebesar US\$ 46,7 miliar per tahun, potensi peraian umum sebesar US\$ 1,1 miliar per tahun, potensi budidaya tambak sebesar US\$ 10 miliar per tahun, potensi budidaya air tawar sebesar US\$ 5,2 miliar per tahun, dan potensi bioteknologi kelautan sebesar US\$ 4 miliar per tahun. Selain itu, potens lainnya pun dapat dikelola, seperti sumber daya yang tidak terbaharukan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan Indonesia (Putra, 2011).

Menurut Daryanto (2007) dalam Putra (2011), sumber daya pada sektor perikanan merupakan salah satu sumber daya yang penting bagi hajat hidup masyarakat dan memiliki potensi dijadikan sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi nasional. Hal ini didasari pada kenyataan bahwa pertama, Indonesia

memiliki sumber daya perikanan yang besar baik ditinjau dari kuantitas maupun diversitas. Kedua, Industri di sektor perikanan memiliki keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya. Ketiga, Industri perikanan berbasis sumber daya nasional atau dikenal dengan istilah *national resources based industries*, dan keempat Indonesia memiliki keunggulan (*comparative advantage*) yang tinggi di sektor perikanan sebagaimana dicerminkan dari potensi sumber daya yang ada.

Hamzah *et.al.* (2008) menyatakan, secara geografis letak kepulauan Nusantara (Indonesia) sangat strategis dalam konteks perdagangan laut internasional antara dunia barat dan timur. Pada berbagai wilayah tersebut laut merupakan penghubung antara pulau-pulau tersebut disamping sebagai tempat utama kegiatan penangkapan ikan serta hasil laut lainnya oleh nelayan. Kusumastanto (2002) mencatat di Indonesia terdapat 42 kota dan 181 kabupaten terletak di wilayah pesisir. Sumber daya ikan sebagai bahan konsumsi 90% berasal dari wilayah pesisir. Sementara Syam dalam Suhartini *et.al.* (2005) memperkirakan luas maritim Indonesia mencapai 5,8 juta km<sup>2</sup> dan dapat menjadi potensi sumber daya kelautan sebagai salah satu tumpuan harapan masa depan.

## **2.4 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Sumber Daya Manusia**

### **2.4.1 Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia adalah orang – orang yang merancang dan menghasilkan barang atau jasa, mengawasi mutu, memasarkan produk, mengalokasikan sumber daya finansial, serta merumuskan seluruh strategi dan tujuan organisasi. Tanpa orang – orang yang memiliki keahlian atau kompeten maka mustahil bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Sumber daya manusia inilah yang membuat sumber daya lainnya dapat berjalan. Banyaknya keunggulan

yang dimiliki organisasi atau perusahaan, tidak akan dapat memaksimalkan produktivitas (Samsudin, 2009).

Dengan semakin berkembangnya keadaan yang terjadi di dalam masyarakat, manusia senantiasa mempunyai kedudukan yang makin penting. Meskipun kita berada atau sedang menuju masyarakat yang berorientasi kerja, yang memandang kerja adalah sesuatu yang mulia, kita tidaklah berarti mengabaikan manusia yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Sumber daya manusia perlu penanganan manajemen untuk mengoptimalkan tujuan, asal saja nilai dan harkat manusia merupakan pijakan dan pertimbangan dari manajemen (Sondang, 1993).

Pengembangan sumber daya manusia adalah penyiapan manusia atau karyawan untuk memikul tanggung jawab lebih tinggi dalam organisasi atau perusahaan. Pengembangan sumber daya manusia berhubungan erat dengan peningkatan kemampuan intelektual yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang lebih baik. Pengembangan sumber daya manusia berpijak pada fakta bahwa setiap tenaga kerja membutuhkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang lebih baik. Pengembangan lebih terfokus pada kebutuhan jangka panjang dan hasilnya hanya dapat diukur dalam waktu jangka panjang. Tujuan pokok pengembangan sumber daya manusia adalah meningkatkan kemampuan, keterampilan, sikap, dan tanggung jawab sehingga lebih efektif dan efisien (Samsudin, 2009).

#### **2.4.2 Manajemen Sumber Daya Manusia**

Menurut Dessler (1997), manajemen sumber daya manusia adalah suatu kebijakan dan praktik yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan aspek “orang” atau sumber daya manusia dari posisi seorang manajemen, meliputi perekrutan, pelatihan, pengimbangan dan penilaian.

Manajemen sumber daya manusia (*human resources management*) adalah suatu kegiatan pengelolaan yang meliputi pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa bagi manusia sebagai individu anggota organisasi atau perusahaan bisnis. Manajemen sumber daya manusia juga menyangkut cara – cara mendesain perencanaan, penyusunan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi kinerja, kompensasi karyawan, dan hubungan ketenagakerjaan. Manajemen sumber daya manusia melibatkan semua praktik manajemen yang dapat memengaruhi secara langsung terhadap organisasi. Manajemen sumber daya manusia terdiri dari serangkaian kebijakan yang terintegrasi tentang hubungan ketenagakerjaan yang memengaruhi orang – orang dan organisasi. Manajemen sumber daya manusia merupakan aktivitas – aktivitas yang dilaksanakan agar sumber daya manusia dalam organisasi dapat didayagunakan secara efektif dan efisien guna mencapai berbagai tujuan (Samsudin, 2009).

## **2.5 Pariwisata**

Menurut Kodyat (1983) pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ketempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan atau kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu.

Selanjutnya Burkart dan Medlik (1987), menjelaskan pariwisata sebagai suatu transformasi orang untuk sementara dan dalam waktu jangka pendek ketujuan-tujuan di luar tempat di mana mereka biasanya hidup dan bekerja, dan kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di tempat-tempat tujuan itu.

Sedangkan Wahab (1985), menjelaskan pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standart hidup serta

menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya. Sebagai sektor yang kompleks, pariwisata juga meliputi industri-industri klasik seperti kerajinan tangan dan cinderamata, penginapan, transportasi secara ekonomi juga dipandang sebagai industri

Dalam Undang – Undang No.10 Tahun 2009 kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Dalam Undang – Undang No.9 Tahun 1990 menyebutkan, pengusaha objek dan daya tarik wisata dikelompokkan ke dalam :

- a. pengusaha objek dan daya tarik wisata alam;
- b. pengusaha objek dan daya tarik wisata budaya;
- c. pengusaha objek dan daya tarik wisata minat khusus

Menurut Muljadi (2009) meskipun terdapat variasi batasan pariwisata, namun selalu mengandung tiga ciri pokok, yaitu: a). Adanya unsur *travel* (perjalanan) yaitu pergerakan manusia dari satu tempat ketempat yang lain, b). Adanya unsur "tinggal sementara" ditempat yang bukan merupakan tempat tinggal yang biasanya, dan c). Tujuan utama dari pergerakan manusia tersebut bukan untuk mencari penghidupan/pekerjaan ditempat yang dituju. Selain itu terdapat tiga komponen pokok yang secara umum disepakati, sebagai berikut: a). *Traveler*, yaitu orang yang melakukan perjalanan antar dua atau lebih lokasi, b). *Visitor*, yaitu orang yang melakukan perjalanan ke daerah yang bukan merupakan tempat tinggalnya, kurang dari 12 bulan, dan tujuan perjalanannya bukanlah untuk terlibat dalam kegiatan untuk mencari nafkah, pendapatan, atau penghidupan ditempat tujuan, dan c).

*Tourist*, yaitu bagian dari visitor yang menghabiskan waktu paling tidak satu malam (24 jam) di daerah yang dikunjungi.

Salah satu jenis pariwisata yang berkembang cukup pesat di Indonesia adalah wisata alam (ekowisata). Ekowisata merupakan kegiatan wisata yang menaruh perhatian besar terhadap kelestarian sumberdaya pariwisata. Damanik dan Weber (2006), mengartikan ekowisata sebagai *“responsible travel to natural areas that conserves the environment and improves the well-being of local people”* (perjalanan wisata alam yang bertanggung jawab dengan cara mengkonservasi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal). Sesuai definisi tersebut, ekowisata dapat dilihat dari tiga perspektif, yaitu: pertama, ekowisata sebagai produk; kedua, ekowisata sebagai pasar; dan ketiga, ekowisata sebagai pendekatan pengembangan. Sebagai produk, ekowisata merupakan semua atraksi yang berbasis sumberdaya alam; sebagai pasar, ekowisata merupakan perjalanan yang diarahkan pada upaya-upaya pelestarian lingkungan; dan sebagai pendekatan pengembangan, ekowisata merupakan metode pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya pariwisata secara ramah lingkungan. Kegiatan wisata yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan sangat ditekankan dan merupakan ciri khas ekowisata.

Selanjutnya, Lewaherilla (2004) mengemukakan, salah satu sumberdaya ekowisata yang sangat potensial adalah wilayah pesisir yang mempunyai kekayaan dan keragaman yang tinggi dalam berbagai bentuk alam, struktur historik, adat, budaya dan berbagai sumberdaya yang lain yang terkait dengan pengembangan wisata bahari. Alam dan sekitarnya dengan berbagai keragaman yang tinggi seperti wilayah pesisir mempunyai nilai atraktif dan turistik wajib dikelola dan dikembangkan bagi kesejahteraan masyarakat melalui pariwisata

bahari. Keragaman daerah pesisir untuk pariwisata bahari berupa bentuk alamnya dan juga keterkaitan ekologisnya dapat menarik minat wisatawan baik untuk bermain, bersantai atau sekedar menikmati pemandangan.

## **2.6 Kerangka Berpikir Penelitian**

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dikemukakan, kerangka berpikir penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki 17,480 pulau dengan panjang garis pantai 95,181 km. Tidak heran jika sebanyak 440 kabupaten/kota dari total 495 kabupaten/kota di seluruh Indonesia berada di wilayah pesisir (Data KKP 2008). Pulau-pulau kecil menyediakan sumber daya alam yang produktif untuk dapat dikembangkan misalnya terumbu karang, padang lamun (*sea grass*), hutan *mangrove*, perikanan, dan kawasan konservasi serta menjadi faktor penting dalam menggerakkan pariwisata bahari. Akan tetapi melihat realitas yang ada saat ini, kekayaan alam maupun pulau-pulau kecil rentan kerusakan, baik itu dari alam maupun akibat tindakan manusia, seperti pencemaran, perusakan ekosistem, dan penangkapan ikan secara berlebihan (*overfishing*).

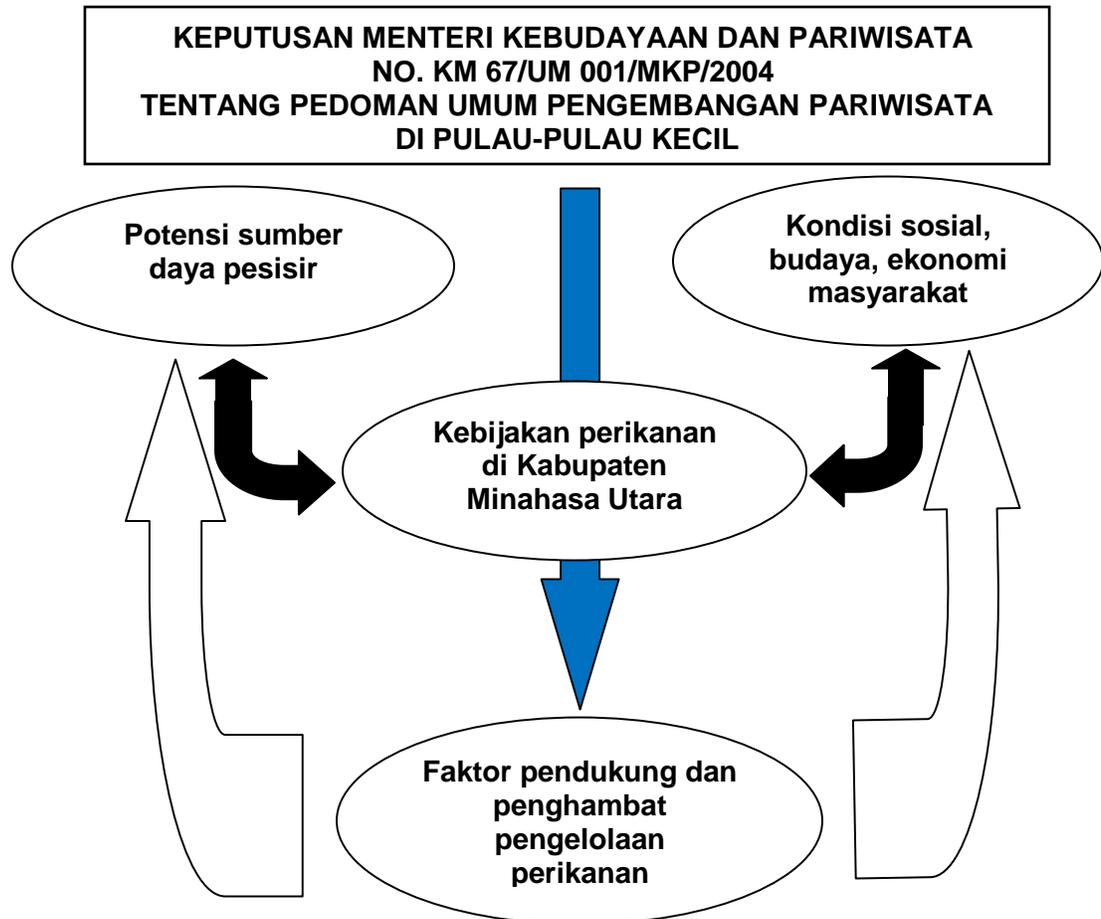
Pulau Bangka terletak dalam wilayah administratif Kecamatan Likupang Timur memiliki sumber daya pesisir yang potensial berupa sumber daya hayati, sumber daya nonhayati, sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan. Sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lainnya. Sumberdaya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut. Sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.

Kemudian bagaimana kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Desa Lihunu Pulau Bangka mengelola perikanan dengan pengelolaan melalui konsep kepariwisataan mengacu pada Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. KM 67/UM 001/MKP/2004 yang menegaskan bahwa pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil adalah prinsip partisipasi masyarakat, dalam hal ini di Desa Lihunu-Pulau Bangka adalah masyarakat pesisir.

Perikanan melalui konsep kepariwisataan di Desa Lihunu-Pulau Bangka, Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa Utara merupakan sektor yang masih berpeluang untuk dikembangkan lebih baik lagi. Potensi wisata alam, wisata bahari, dan wisata budaya masih dapat dikembangkan lebih optimal dengan memanfaatkan kekayaan alam bahari di Pulau Bangka. Masyarakat pesisir yang bermukim di Desa Lihunu-Pulau Bangka Kecamatan Likupang Kabupaten Minahasa Utara merupakan masyarakat perikanan yang masih memiliki kearifan lokal dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan di kawasan tersebut.

Dalam pelaksanaannya peraturan atau keputusan ini ditanggungjawabkan pada aparat pemerintah daerah dan instansi terkait. Sesuai dengan berlakunya Undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, setiap daerah diwajibkan untuk dapat mengembangkan dan mengelola potensi daerahnya masing-masing. Pemerintah Pusat memiliki tanggung jawab dalam menyiapkan kebijakan makro sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah.

Kerangka berpikir penelitian ini secara skematis dapat diilustrasikan seperti terlihat pada gambar 1.

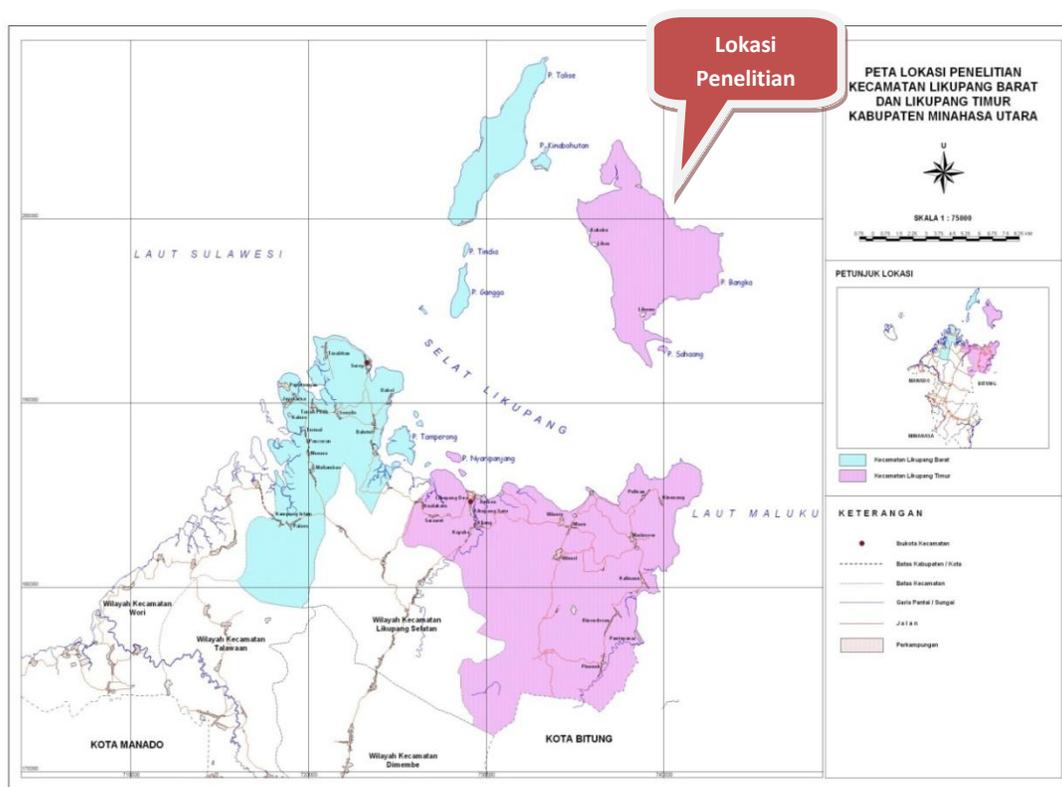


**Gambar 1.** Skema konsep penelitian

### 3. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Lokasi Dan Waktu

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di wilayah Desa Lihunu, Pulau Bangka Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Peta lokasi penelitian disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian  
Sumber : Data Pemkab Minahasa Utara, 2010

Dan waktu pelaksanaannya pada Bulan Oktober sampai dengan November 2011.

### 3.2 Obyek Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah masyarakat perikanan Desa Lihunu pesisir Pulau Bangka di wilayah Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Terletak pada koordinat bujur  $125.1^{\circ}$ - $125.05^{\circ}$  timur serta lintang  $1.8^{\circ}$ - $3.2^{\circ}$  utara.

### 3.3 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan subjektivitas bersifat mikro sampai makro. Pendekatan ini digunakan untuk mengungkap keunikan yang ada pada individu, kelompok, organisasi atau institusi tertentu (Susilo, 2010). Selanjutnya, Moleong (2007), mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang dialami dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini lebih mengacu pada pendapat Muhadjir (1992) dalam Susilo (2010), yaitu pada tataran kualitatif positivistik, sebuah tipe penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif.

Berdasarkan data dan informasi yang akan dikumpulkan penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu studi dokumentasi hasil-hasil penelitian sejenis di tempat yang berbeda dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian, dan kedua menggunakan metode studi kasus yang merujuk pada Yin (2011), bahwa studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok: (i) bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan “bagaimana” (*how*) atau “mengapa” (*why*); (ii) bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-

peristiwa yang akan diseidiki; dan (iii) bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena-fenimena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata. Kasus yang dikaji dalam penelitian ini adalah pengaruh dari turunnya Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. KM 67/UM 001/MKP/2004 terhadap masyarakat pesisir di Desa Lihunu-Pulau Bangka.

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti secara langsung kepada objek penelitian di lapangan. Data diperoleh langsung dari responden melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan menggunakan *check list*, dan pengamatan berpartipasi (*participatory observation*).
- b. Data sekunder, yaitu pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti secara tidak langsung kepada objek penelitian. Data yang diperoleh adalah data yang disajikan oleh pihak-pihak lain. Data sekunder diperoleh melalui penelusuran hasil studi sebelumnya serta data statistik dengan melakukan survei institusional. Institusi yang dituju untuk mendukung penelitian ini adalah institusi yang membawahi beberapa bidang yang terkait dengan tujuan penelitian seperti pemerintahan provinsi, kabupaten yakni Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta dinas-dinas terkait dalam pengembangan perikanan, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa lokasi penelitian.

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori data, konsep, dan atribut seperti disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Kategori Data dan Konsep Penelitian

<b>Kategori</b>	<b>Konsep</b>	<b>Atribut</b>	<b>Teknik Pengumpulan Data</b>
1. Potensi sumber daya pesisir	Potensi alam/fisik	-Kondisi pantai dan pasir -Kondisi air dan ombak -Kondisi karang bebatuan -Kondisi flora dan fauna	Observasi dan wawancara
	Potensi sumber daya manusia	-Kemampuan masyarakat dalam berusaha -Tingkat pendidikan masyarakat	
2. Kondisi sosial, budaya, ekonomi masyarakat	Status dan peran	Kedudukan individu dalam kelompok atau kelompok dengan kelompok lain dalam struktur masyarakat	Observasi, wawancara, dan data sekunder
	Potensi budaya dan seni	-Daya tarik dan keunikan -Siklus penampilan -Keterkaitan dengan religi atau mitos	
	Cakupan usaha	Jenis-jenis usaha perikanan yang dilakukan	
	Sistem usaha yang digunakan	Aturan-aturan yang dipakai dalam pelaksanaan usaha perikanan	

3. Kebijakan perikanan di Kabupaten Minahasa Utara.	Rencana strategis	Kebijakan-kebijakan yang akan diberlakukan	Pengumpulan data sekunder
	Program	Kebijakan-kebijakan yang telah diberlakukan yang sesuai dengan rencana strategis	
4. Faktor pendukung dan penghambat pengelolaan perikanan	Peluang dan ancaman dalam pengelolaan perikanan	Peluang yang dapat dikembangkan dan ancaman yang harus dimimalisir	Observasi, wawancara, dan pengumpulan data sekunder

Data-data tersebut dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan beberapa langkah. Pertama adalah melakukan pengumpulan bahan dokumen, yaitu berupa laporan penelitian tentang masyarakat nelayan yang relevan dengan judul penelitian. Kedua adalah melakukan observasi, terutama terhadap potensi sumber daya alam yang ada serta aktivitas masyarakat pesisir dalam melakukan pemanfaatan sumber daya pesisir. Pemanfaatan itu antara lain, tentang keterlibatan masyarakat pesisir dalam melakukan kegiatan pariwisata, aktivitas penangkapan (melaut), dan aktivitas dalam usaha pemanfaatan hasil hutan. Ketiga adalah dengan melakukan wawancara dengan *informant* dan *key informant*. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara (terlampir) dengan menggunakan *life history*.

### 3.5 Penentuan Responden

Teknik penentuan responden yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik non random sampling dengan jenis *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel/responden dimana pengambilan elemen-elemen yang dimasukkan dalam sampel dilakukan dengan sengaja, dengan catatan bahwa sampel tersebut memiliki ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, pengumpulan data yang menggunakan wawancara dilakukan dengan pedoman wawancara *life history*. Para *key informant* dan *informant*, ditentukan dengan teknik *snowball*, yaitu dengan acuan awal orang yang ditentukan adalah tetua adat atau kepala adat lokasi setempat yang paham akan sejarah dan kondisi lokasi penelitian. *Informant* lainnya yang termasuk dalam penelitian ini yaitu masyarakat Desa Lihunu yang terkait dengan kegiatan dan aktivitas wisata dalam kelompok jasa dan atau usaha, pemerintah setempat maupun para pemuka masyarakat dari tokoh adat maupun tokoh agama. Sedangkan dari pihak pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara yaitu diwakili oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten (BAPPEKAB), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan serta dinas-dinas terkait dengan masyarakat Desa Lihunu, pemerintah kecamatan Likupang dan pemerintah desa. Nama-nama *key informant* disajikan pada tabel 2.

**Tabel 2.** Daftar Nama *Key informant* dan *Informant*

No.	Nama	Waktu wawancara	Lokasi wawancara dan keterangan
1	Fentje Datang	18 November 2011	Rumah FD
2	Roby Andaria	18 November 2011	Rumah RA
3	Jody Takumansang	19 November 2011	Rumah JT
4	Benyamin Takumansang	21 November 2011	Rumah JT (kemenakan BT)
5	Hudia Tatibas	21 November 2011	Di depan gereja GMIM Desa Lihunu setelah HT selesai ibadah
6	Lansus Ruitang	22 November 2011	Dalam <i>Focus Group Discussion</i> kemudian dilanjutkan di rumah LR
7	Wempriit Bawole	22 november 2011	Dalam <i>Focus Group Discussion</i> kemudian dilanjutkan di rumah LR
8	Ombe Ambi	23 November 2011	Rumah OA
9	Ulva	24 November 2011	Mimpi Indah Resort (rumah Ulva selaku pemilik usaha wisata)
10	Sarlis Saredo	25 November 2011	Halaman rumah AG (rumah di depan gereja GMIM Desa Lihunu setelah SS selesai beribadah)
11	Kadis DKP Kabupaten Minahasa Utara	28 November 2011	Kantor DKP Kabupaten Minahasa Utara
12	Kadis Budpar Kabupaten Minahasa Utara	28 November 2011	Kantor Disbudpar Kabupaten Minahasa Utara

### 3.6 Analisis Data dan Kerangka Analisis Data

#### 3.6.1 Analisis Data

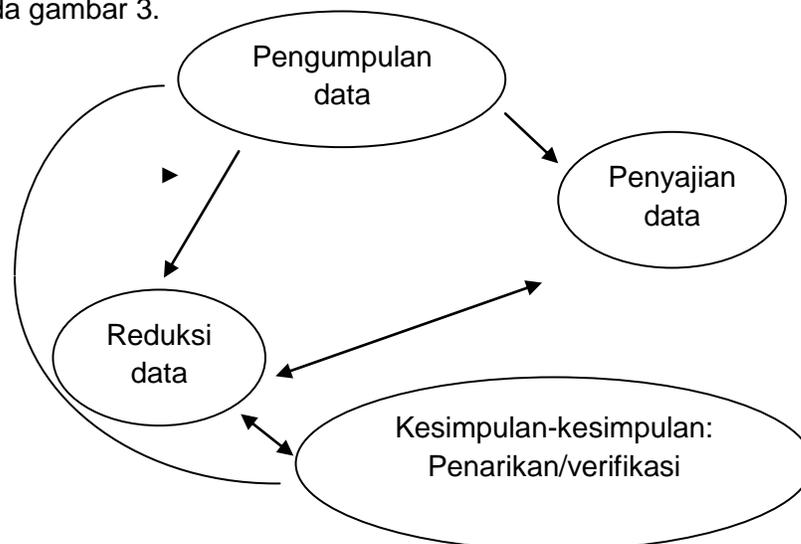
Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisa data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Keputusan mengenai rancangan apa yang dipakai tergantung pada tujuan penelitian, sifat masalah, dan berbagai alternatif yang mungkin digunakan. Berdasarkan tujuan penelitian, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif.

Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik. Namun pada umumnya data kualitatif kadang-kadang dikuantitatifkan agar dapat diproses lebih lanjut (Kuncoro, 2003). Analisa data deskriptif kualitatif (analisa non statistik) adalah analisa data yang dapat diukur secara tidak langsung dan data tersebut dapat diuraikan dan ditafsirkan. Menurut Moleong (2006) proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan dan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Langkah berikutnya ialah mengadakan *reduksi data* yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan-satuan dan kemudian dikategorisasikan, dikoding, dan tahap akhir dari analisis data adalah mengadakan keabsahan data dan mengolah hasil sementara menjadi teori substantif dengan menggunakan beberapa metode tertentu.

Analisis data deskriptif kualitatif dalam penelitian ini dilakukan untuk :

1. Menganalisis potensi sumber daya Desa Lihunu Pulau Bangka, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara.
2. Menganalisis pengaruh turunnya Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. KM 67/UM 001/MKP/2004 terhadap keseharian masyarakat Desa Lihunu Pulau Bangka, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara.
3. Menganalisis kebijakan perikanan di Kabupaten Minahasa Utara untuk menjawab tujuan bagaimana pengembangan dan pengelolaan perikanan di Desa Lihunu Pulau Bangka, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara.
4. Menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat usaha pengelolaan sumber daya pesisir yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lihunu Pulau Bangka, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara.

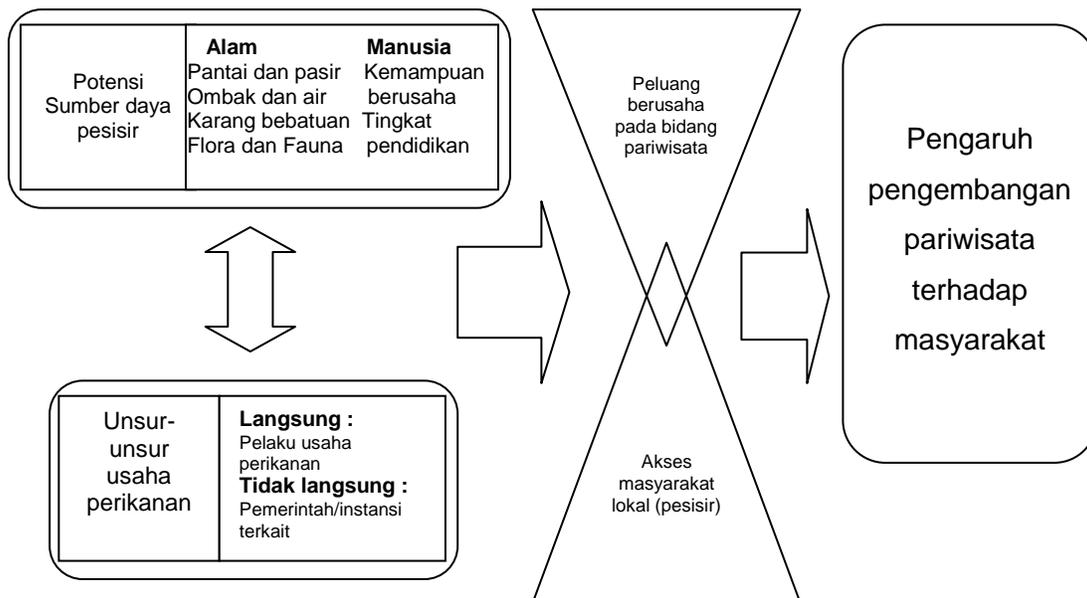
Menurut Miles dan Huberman (1992) dalam Susilo (2010), peneliti bergerak dalam di antara “sumbu” kumparan selama pengumpulan data, bergerak bolak-balik di antara kegiatan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, seperti disajikan pada gambar 3.



Gambar 3. Komponen-komponen Analisis Data: Model interaktif (Sumber: Susilo, 2010)

### 3.6.2 Kerangka Analisis Data

Sumber daya pesisir Pulau Bangka tepatnya di Desa Lihunu memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan dalam pengelolaan perikanan melalui konsep pariwisata. Terbitnya Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. KM 67/UM 001/MKP/2004 tentang pedoman umum pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil diharapkan mampu memberikan pandangan dan membuka pola pikir terutama masyarakat lokal dalam rangka pengembangan potensi-potensi perikanan. Serta memunculkan sinergi dalam hubungan antara *stakeholder* dalam rangka pengelolaan pesisir baik yang langsung (masyarakat lokal pesisir Desa Lihunu, Pulau Bangka) maupun tidak langsung (pemerintah/instansi terkait). Untuk jelasnya, kerangka analisis data dapat disajikan dalam Gambar 4 di bawah ini.

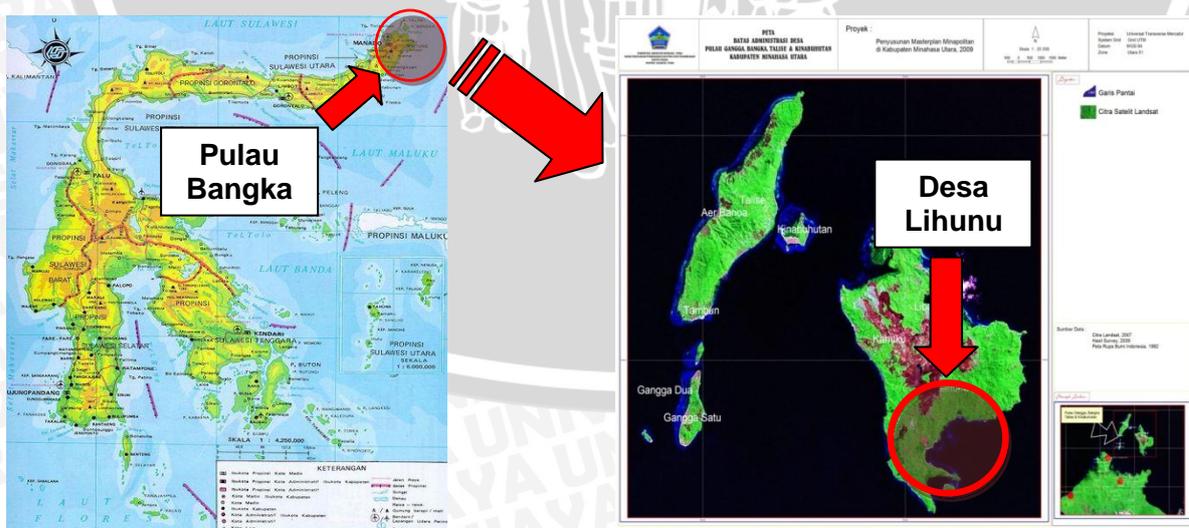


Gambar 4. Kerangka Analisis Pengaruh Pengembangan Pariwisata Terhadap Masyarakat Lokal Desa Lihunu

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 4.1 Masyarakat Pesisir Pulau Bangka

Pulau Bangka terletak dalam wilayah administratif Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara yang berbatasan dengan Pulau Gangga dan Pulau Talise Kecamatan Likupang Barat. Luas seluruh wilayah Pulau Bangka 2.729 ha dengan jumlah penduduk 2.649 jiwa dan jumlah kepala keluarga 724 KK tersebar di tiga desa yaitu Desa Lihunu, Desa Kahuku, dan Desa Libas (Anonymous, 2010). Penduduk Pulau Bangka mayoritas didominasi oleh orang Siao dan Sangihe. Jarak Pulau Bangka dari ibukota Provinsi Sulawesi Utara, Manado adalah 120 km dan ditambah 40 mil laut. Perjalanan ke Pulau Bangka dari Manado ditempuh dengan 2 jam perjalanan darat serta 1 jam perjalanan laut. Perjalanan darat tersebut adalah menuju ke ibukota Kecamatan Likupang Timur yaitu di Tatelu. Dan perjalanan laut adalah dari Tatelu ke Pulau Bangka. Sebagian besar aktivitas perdagangan dan operasional sehari-hari masyarakat di Pulau Bangka didukung dari ibukota Kecamatan Likupang ini. Seperti bahan makanan pokok, pakaian, dan bahan bakar minyak.



Gambar 5. Peta lokasi Desa Lihunu

Sumber : Diolah dari data Pemkab Minahasa Utara, 2010

Mata pencaharian masyarakat lokal yang bermukim di Pulau Bangka sebagian besar utamanya adalah nelayan. Namun tidak sedikit pula yang mengelola perkebunan dan lahan pertanian yang lain. Para penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan umumnya adalah mereka yang masih banyak menggunakan alat semi-tradisional, dengan jaring berperahu mesin namun hanya berkekuatan 15 PK. Mereka menyebut dengan perahu peleng. Sedangkan penduduk yang berkebun atau mengelola lahan pertanian adalah para nelayan yang tidak memiliki perahu sendiri, atau anggota pemerintahan desa yang sembari mengelola lahan yang mereka miliki. Umumnya para penduduk yang bermata pencaharian berkebun adalah penduduk yang kurang memiliki kemampuan untuk melaut, misalnya kaum ibu maupun para lelaki yang sudah menjelang usia non-produktif (di atas 70 tahun).

**Tabel 3.** Keadaan Penduduk Pulau Bangka Menurut Kelompok Umur Tahun 2010

No	Klasifikasi Umur	Desa /Penduduk			Jumlah
		Lihunu	Kahuku	Libas	
1	0 - 4	102	85	50	237
2	5 - 9	107	80	47	234
3	10 - 14	113	78	46	237
4	15 - 19	106	80	43	229
5	20 - 24	102	75	44	221
6	25 - 29	80	82	47	209
7	30 - 34	98	81	44	223
8	35 - 39	99	73	41	213
9	40 - 44	87	76	43	206
10	45 - 49	68	75	39	182
11	50 - 54	67	66	34	167
12	55 - 59	47	59	29	135
13	60 - 64	38	40	20	98
14	65 - 69	30	19	16	65
15	70 +	18	14	9	41
Jumlah		1162	983	552	2697

Sumber: Diolah dari Anonimous, 2010

Sedangkan penggolongan penduduk menurut usia ini dimaksudkan untuk mengetahui usia produktif dari masyarakat Desa Lihunu. Usia produktif disini diasumsikan sebagai keadaan dimana menurut usianya, masyarakat dapat melakukan segala hal. Hal ini sebagai indikator menganalisis besarnya potensi sumber daya manusia yang ada di Desa Lihunu dalam berusaha, baik pada bidang perikanan maupun diarahkan pada sektor pariwisata.

#### 4.2 Desa Lihunu

Salah satu wilayah desa pesisir di Pulau Bangka adalah Desa Lihunu. Berbatasan sebelah utara dengan Desa Libas, sebelah timur dengan Laut Maluku, sebelah selatan dengan Selat Likupang, dan sebelah barat dengan Desan Kahuku. Terdiri dari 6 wilayah jaga yang terdapat di Desa Lihunu yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Jaga dan dibantu seorang *Maweteng*. Desa-desa di Pulau Bangka termasuk Lihunu dipimpin oleh seorang pemimpin desa yang disebut dengan *Opok* (Lurah). Wilayah Desa Lihunu memiliki prasarana jalan desa sepanjang total 8 km yang menghubungkan antar Wilayah Jaga dan menuju ke dermaga yang merupakan pusat sarana transportasi utama laut menuju ibukota kecamatan. Jalan desa tersebut terbuat dari rabat beton dengan lebar 3 m yang termasuk saluran air (*drainase*) di tiap tepi jalan. Penduduk Desa Lihunu berjumlah 1.162 jiwa dengan klasifikasi sebanyak 687 jiwa adalah laki-laki dan 475 jiwa adalah perempuan (Anonymous, 2010<sup>b</sup>).

Klasifikasi masyarakat Desa Lihunu menurut jenis kelaminnya, yaitu jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan dimaksudkan untuk mengetahui gambaran peranan perempuan dalam pengaruhnya terhadap pengelolaan di wilayah pesisir. Dalam Andriati (2008) menjelaskan bahwa berbagai penelitian pada masyarakat nelayan menunjukkan bahwa posisi perempuan nelayan golongan menengah dan miskin cenderung rendah, sekalipun kontribusi sosial-ekonomi mereka cenderung lebih besar. Bahkan curahan waktu

yang diberikan oleh istri nelayan jauh lebih lama, dibandingkan dengan suami mereka yang seringkali memiliki beban ganda. Kenyataan ini memperkuat dugaan bahwa posisi dan/atau status perempuan lebih ditentukan konstruksi sosial tentang peran jender.

Keadaan penduduk perempuan di Desa Lihunu sangat berpengaruh signifikan terhadap usaha-usaha pengelolaan dan pengembangan potensi-potensi yang ada di Desa Lihunu sebagai masyarakat pesisir. Peranan perempuan disini selain sebagai penopang usaha dalam rumah tangga (membantu pekerjaan suami), juga berkaitan dengan pembentukan sumber daya manusia masyarakat Desa Lihunu. Hal ini tidak terlepas dari peran perempuan selaku ibu rumah tangga sebagai pendidik langsung yang bersinggungan langsung dengan anak-anak. Dari peran perempuan-perempuan inilah juga dapat menentukan tingkat kualitas sumber daya manusia masyarakat di Desa Lihunu.

Penduduk Desa Lihunu, seperti halnya masyarakat pesisir lainnya sebagian besar bermata pencaharian utama sebagai nelayan. Secara statistik, data menunjukkan bahwa mata pencaharian paling banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Lihunu adalah sebagai petani. Namun hal ini bukan menjadi pekerjaan utama mereka, karena sebagian besar petani adalah mereka yang tidak memiliki perahu atau peralatan yang mumpuni untuk dapat melakukan kegiatan sebagai nelayan. Kegiatan pertanian ini juga tidak dilakukan secara intensif karena dialokasikan hanya untuk mengisi kekosongan apabila pada waktu tidak memungkinkan melaut, seperti saat musim angin yaitu pada bulan Desember sampai Pebruari. Data keadaan penduduk Desa Lihunu menurut mata pencaharian tersaji pada Tabel 4 berikut :

**Tabel 4.** Keadaan Penduduk Desa Lihunu Menurut Mata Pencaharian Tahun 2010

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	204
2	Nelayan	132
3	Pedagang	20
4	Tukang	18
5	Buruh bangunan	15
6	PNS (Guru)	16
7	Jasa Angkutan	6
8	Jasa Pariwisata	43
9	Pensiunan	9
Jumlah		463

Sumber: Diolah dari Anonimous, 2010

Klasifikasi penduduk menurut mata pencaharian ini dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan masyarakat Desa Lihunu dalam berusaha. Hal ini berkaitan dengan motivasi berusaha dalam pengembangan wilayah pesisir. Dengan mengetahui kemampuan masyarakat dari klasifikasi pekerjaannya, dapat diasumsikan masyarakat memiliki kemampuan melakukan usaha yang lain yang dihasilkan dari pengelolaan potensi sumber daya yang ada yang belum dioptimalkan, seperti usaha jasa di bidang pariwisata.

Penduduk Desa Lihunu mayoritas (95%) adalah suku Sangehe etnis Siau selebihnya pendatang dari daerah Makasar, Ambon, dan Halmahera. Dominasi suku Sangehe erat kaitannya dengan sejarah penghuni pertama Pulau Bangka yaitu orang Sangehe.

Berdasarkan dokumentasi sejarah Desa Lihunu<sup>1</sup> sebelum tahun 1900, daerah timur Pulau Bangka ini belum berpenduduk atau bahkan belum pernah didatangi orang. Mulai tahun 1900 tiba 3 orang bersaudara dengan perahu nelayan berbentuk pelang, yang berasal dari Pulau Sangehe. Ketiga orang tersebut bernama (dalam bahasa Sangehe) Bukala kombang, yang berarti gelang

isi perut, Wahakiki, yang berarti kera menggigit, dan Rangeng mailang, yang berarti “didatang menghilang”. Ketiga orang inilah yang mula-mula tiba/mendarat dimana ada pantai dan tempat itu sekarang disebut Totohe yang sebenarnya berasal dari bahasa daerah Sangihe, Nitotokang yang berarti tempat menginjakkan kaki yang pertama.

Tahun 1914 daerah sebelah timur Pulau Bangka ini masuk dalam wilayah pemerintahan Hukum Tua Gangga, dan sebagai pemimpin adalah Kepala Jaga bernama Markus Gaghenggang dibantu seorang *maweteng* bernama Petrus Nangkoda. Sejak itu pula inisiatif Markus Gaghenggang, Petrus Nangkoda, dan Simon Buagho mewujudkan satu musyawarah dan mufakat untuk memilih satu tempat yang strategis untuk dijadikan desa/perkampungan. Tempat/tanah yang terpilih itu adalah sebagian milik dari Petrus Nangkoda dan sebagian milik Simon Buagho seluas total 265 x 230 meter. Begitulah tempat/tanah yang sudah dihibahkan oleh kedua pemilik tersebut dijadikan perkampungan/desa dan penduduk yang berpencar-pencar ditampung ditempat yang terpilih itu. Tempat yang didiami mereka pertama dijadikan daerah perkebunan penduduk.

Desa ini dinamai Haindunu (dalam bahasa Sangihe) artinya “maksud tercapai”, sedang lain alasan lain juga dinilai dari sekitar tempat itu tidak lain tumbuhnya sejenis semak-semak yang dalam bahasa daerah Sangihe tumbuhan itu bernama pohon Lihunu. Daunnya dapat dijadikan obat panas/obat malaria waktu itu. Demikianlah nama Desa Lihunu yang berasal dari kata bahasa Sangihe.

#### **4.3 Potensi alam/fisik Desa Lihunu**

Semua potensi yang dimiliki Pulau Bangka khususnya wilayah Desa Lihunu dimanfaatkan dalam bidang perikanan dan dikembangkan ke arah sektor pariwisata. Menurut Soetomo (2009) menyatakan bahwa salah satu sumber daya pembangunan yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan untuk

meningkatkan taraf hidup masyarakat adalah sumber daya alam. Sejarah perkembangan manusia sejak masa kehidupan nomaden sampai jaman industrialisasi menunjukkan bahwa salah satu cara manusia dalam memenuhi kebutuhannya adalah dengan memanfaatkan alam secara langsung, artinya memenuhi kebutuhan dengan jalan mengambil apa saja yang disediakan alam. Sedangkan dalam jaman industrialisasi manusia memanfaatkan alam dengan dibantu oleh penguasaan teknologi. Pada kenyataannya dalam setiap masyarakat selalu tersedia sumber-sumber alam, walaupun demikian memang dijumpai adanya variasi. Dengan pengertian ada lingkungan masyarakat dengan sumber daya alam melimpah dan ada juga yang memiliki sumber daya alam terbatas.

Sumber daya alam ialah suatu sumber daya yang terbentuk karena kekuatan alamiah. Elemen dari sumber daya alam, misalnya air, pepohonan, udara, hamparan pegunungan, danau, bentang alam dan sebagainya tidak akan menjadi sumber daya yang berguna bagi pariwisata. Kecuali semua elemen tersebut dapat memuaskan dan memenuhi kebutuhan manusia (Pitana dan Diarta, 2009).

Menurut Fennel (1999), sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi sumber daya pariwisata, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Lokasi geografis, hal ini menyangkut karakteristik ruang yang menentukan kondisi yang terkait dengan beberapa variabel lain.
2. Iklim dan cuaca, ditentukan oleh *longitude* dan *elevation* diukur dari permukaan laut, daratan, pegunungan, dan sebagainya. Bersama faktor geologis, iklim merupakan faktor penentu utama dari lingkungan fisik yang mempengaruhi vegetasi, kehidupan binatang, angin, dan sebagainya.
3. Topografi dan *landforms*, bentuk umum dari permukaan bumi yang membuat beberapa areal geografis menjadi bentang alam yang unik

(*landform*). Kedua aspek ini menjadi daya tarik tersendiri yang membedakan kondisi geografis suatu wilayah/benua dengan wilayah/benua lainnya sehingga sangat menarik untuk menjadi atraksi wisata.

4. *Surface materials*, menyangkut sifat dan ragam material yang menyusun permukaan bumi, misalnya formasi bebatuan alam, pasir, mineral, dan sebagainya yang sangat unik dan menarik sehingga bisa dikembangkan menjadi atraksi wisata alam.
5. Air, air memegang peran sangat penting dalam menentukan tipe dan level rekreasi *outdoor*, misalnya bisa dikembangkan jenis wisata pantai/bahari, danau dan sungai, dan sebagainya (*sailing, cruises, fishing, snorkling*, dan sebagainya)
6. Vegetasi, merujuk pada keseluruhan kehidupan tumbuhan yang menutupi suatu area tertentu. Kegiatan wisata ini sangat tergantung pada kehidupan dan formasi tumbuhan.
7. Fauna, beragam binatang berperan cukup signifikan terhadap aktivitas wisata, baik dipandang dari sisi konsumsi (misalnya wisata berburu dan memancing) maupun non-konsumsi (misalnya *bird watching*).

Sedangkan Damanik dan Weber (2006) menyatakan bahwa sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata adalah :

1. keajaiban dan keindahan alam (topografi)
2. keragaman flora
3. keragaman fauna
4. kehidupan satwa liar
5. vegetasi alam
6. ekosistem yang belum terjamah manusia
7. rekreasi perairan (danau, sungai, air terjun, pantai)

8. lintas alam (*tracking, rafting*, dan lain-lain)
9. obyek megalithik
10. suhu dan kelembaban udara yang nyaman
11. curah hujan yang normal dan sebagainya

Sehingga potensi alam yang dimaksud disini (dalam penelitian di Desa Lihunu) meliputi kondisi pantai dan pasir, kondisi perairan dan ombak, kondisi terumbu karang dan bebatuan, serta kondisi flora dan fauna.

#### 4.3.1 Kondisi pasir dan pantai

Di Desa Lihunu terdapat beberapa kondisi pantai yang memiliki keindahan yang unik dibandingkan dengan pantai lain yang terdapat di Pulau Bangka. Pantai-pantai tersebut telah memiliki nama yang diberikan oleh masyarakat lokal. Keadaan pantai-pantai tersebut dideskripsikan sebagai berikut :

1. Pantai Sabora

Pantai Sabora terletak disebelah barat Desa Lihunu. Pantai ini mempunyai pemandangan alam yang bagus, dengan kawasan pantai berpasir putih yang luas dengan granular pasir seukuran biji merica. Kondisi air yang biru dan jernih pada kawasan ini masih terjaga dengan panorama bawah air yang memukau, sehingga aktivitas wisata berupa diving untuk melihat keindahan bawah laut sangat sesuai untuk kawasan ini. Dengan kondisi dan panorama alam yang demikian, maka pantai ini sangat berpotensi untuk dijadikan kawasan wisata. Faktor-faktor pendukung lain yang menjadikan kawasan ini memiliki nilai tambah adalah dengan dimilikinya keaneka ragaman ekosistem pantai, dan topografinya yang landai memberikan kesan lapang dan panorama yang indah untuk menikmati saat matahari terbit (*sunrise*) dan matahari terbenam (*sunset*).



**Gambar 6.** Pantai Sabora di Desa Lihunu

Sumber: Data primer penelitian, 2011

## 2. Pantai Totohe

Kawasan pantai ini merupakan salah satu kawasan garis pantai yang berada satu jalur dengan kawasan pantai Pulau Sahaung. Pulau Sahaung adalah pulau tersendiri yang sangat kecil yang berada dalam wilayah Desa Lihunu, memiliki pasir putih sebesar biji merica rata terhampar di sepanjang garis pantai ini. Topografi pantai yang landai dan cukup luas menjadikan daya tarik bagi penikmat keindahan pantai. Kondisi cuaca yang setiap tahun relatif stabil sangat mendukung potensi masuknya wisatawan untuk mendatangi wilayah ini. Kondisi cuaca dan angin yang stabil sangat berpengaruh pula pada bagusnya kondisi ombak di perairan Pantai Totohe. Perairan yang biru dan ombak sedang menambah keindahan pemandangan di wilayah pantai ini.

Selain potensi di permukaan yang mendukung, kondisi bawah laut di perairan Pantai Totohe sangat mengundang wisatawan untuk melakukan atraksi *dive*. Terumbu karang yang masih terjaga kelestariannya menjadikan kawasan ini sebagai salah satu *spot diving* bagi wisatawan yang datang bertujuan untuk menyelam.



**Gambar 7.** Pantai Totohe di Desa Lihunu

Sumber: Data primer penelitian, 2011

### 3. Pantai Sahaung

Pantai Sahaung berada di wilayah barat daya Desa Lihunu. Kondisi pantai yang landai berpasir putih menjadi daya tarik panorama di wilayah ini. Dekelilingi ekosistem tanaman pantai pada umumnya, seperti kelapa menjadikan wilayah pantai yang cukup panas menjadi teduh. Dengan hembusan angin pantai yang segar dan kecepatan rata-rata tidak terlalu kencang, menambah teduh suasana pantai untuk dibuat tempat persinggahan.

Selain menyediakan keindahan panorama daratan, potensi lain di wilayah ini adalah keindahan panorama bawah lautnya. Pengaruh angin yang berhembus sedang, menjadikan gelombang laut yang sedang pula. Atraksi *dive* bawah laut sangat didukung oleh kondisi tersebut. Perairan yang masih jernih kebiruan menjadi daya tarik pula dalam menjadikan wilayah ini sebagai salah satu *spot diving*.

Disamping itu pula keberadaan batu karang yang unik di sekitar wilayah pantai ini, menjadi daya tarik tersendiri bagi penikmat keindahan panorama pantai. Susunan batu dalam ukuran besar yang terlihat seperti hanya ditumpuk

saja, namun mampu menahan derasnya gelombang laut lepas terlihat sangat menakjubkan untuk dinikmati panoramanya.



**Gambar 8.** Pantai Sahaung di Desa Lihunu

Sumber: Data primer penelitian, 2011

#### 4. Pantai Panjang

Disebut Pantai Panjang karena memang garis pantainya cukup panjang dan merupakan yang terpanjang di Pulau Bangka, yaitu lebih dari 2 km. Pantai Panjang terletak di bagian barat Desa Lihunu, dekat dengan kawasan Pantai Sabora. Di pantai ini dapat dijumpai pasir putih yang sangat halus dan warnanya jauh lebih bersih dibandingkan pasir putih yang lain yang berada di wilayah Pulau Bangka. Selain itu pula di sekitar pantai ini banyak sekali *spot snorkling* yang dapat dikunjungi. Jaraknya hanya sekitar 5 meter dari garis pantai dan berada hampir di sepanjang garis pantai



**Gambar 9.** Pantai Panjang di Desa Lihunu

Sumber: Data primer penelitian, 2011

5. Pantai Kalipepu

Pantai Kalipepu dengan panjang pantai lebih kurang dari 1 km memiliki andalan daya tarik pemandangan Batu Kuhia dan Batu Gosoh. Pantai ini berada di bagian tenggara Desa Lihunu. Kawasan ini memiliki keunikan berupa pemandangan batu karang di laut lepas yang langka, jarang dijumpai di wilayah manapun di Indonesia. Yaitu terdiri dari dua buah karang besar, yang terlihat seperti 'ditumpuk' sedemikian rupa tanpa adanya bantuan perekat berupa apapun. Batu ini telah berada sedemikian rupa selama berpuluh-puluh tahun dan bagian tumpukan atasnya tidak pernah meskipun dihantam gelombang laut lepas. Namun demikian, daya tarik utama di Pantai Kalipepu ini adalah pantai pasir putihnya yang mempesona dan *spot snorkling* bawah lautnya yang jaraknya tidak jauh dari garis pantai.



**Gambar 10.** Pantai Kalipepu di Desa Lihunu

Sumber: Data primer penelitian, 2011

6. Pantai Sengkamau

Pantai Sengkamau memiliki garis pantai cukup panjang pula dibandingkan pantai-pantai yang lain di Pulau Bangka.. Pantai Sengkamau terletak di bagian barat Pantai Panjang, merupakan pantai terpanjang kedua setelah Pantai Panjang dan berada dekat dengan kawasan Pantai Sabora. Kondisi pasir di pantai ini sangat halus dan warnanya jauh lebih bersih dibandingkan pasir putih yang lain yang berada di wilayah Pulau Bangka. Selain itu pula di sekitar pantai ini banyak sekali *spot snorkling* yang dapat dikunjungi. Jaraknya sekitar 5 meter dari garis pantai dan berada sepanjang garis pantai. Oleh karena itu maka telah dicoba dibuka sekolah pusat *transplantasi* karang di wilayah ini, yaitu yang bernama Pusat Penelitian dan Sekolah Mata Karang. Dengan didukung kondisi kualitas perairan yang baik di wilayah pantai ini, hasil-hasil *transplantasinya* dapat disaksikan langsung dari permukaan laut, dengan kedalaman mencapai 5 meter.



**Gambar 11.** Pantai Sengkamau di Desa Lihunu  
Sumber: Data primer penelitian, 2011

#### 4.3.2 Kondisi perairan dan ombak

Sebagai wilayah kepulauan yang memiliki zona perairan laut, perairan di Desa Lihunu secara geografis termasuk dalam perairan sedang wilayah laut Indonesia. Perairan di Pulau Bangka memiliki perairan yang tenang dan berombak tidak terlalu kencang. Hanya pada saat tertentu pada bulan Desember-Pebruari saat musim/angin barat kondisi ombak cukup kencang. Namun pada saat seperti ini masih memungkinkan untuk melakukan atraksi menyelam (*diving*). Kondisi perairan yang masih alami dan terlihat jernih menambah pesona daya tarik bagi pengunjung untuk melakukan kegiatan *snorkling*, atau hanya sekedar menikmati keindahan terumbu karang yang masih dapat terlihat dari permukaan.

Perairan yang berombak tenang di wilayah pesisir desa Lihunu sangat menunjang untuk *fishing ground* ikan-ikan karang. Hal ini dibuktikan bahwa dengan masih mudahnya nelayan di Desa Lihunu mendapatkan hasil tangkapan berupa ikan karang dalam size besar dengan menggunakan peralatan yang masih sederhana. Dari sini dapat disimpulkan bahwa secara kualitas, perairan di

pesisir Desa Lihunu masih dalam kondisi baik yang memungkinkan untuk tumbuh berkembangnya terumbu karang sebagai habitat utama ikan-kan karang.



**Gambar 12.** Perairan dangkal di pesisir Desa Lihunu  
Sumber: Data primer penelitian, 2011

Perairan di wilayah pesisir Pulau Bangka secara keseluruhan termasuk perairan sedang, mulai dari timur yang merupakan perairan berbatasan dengan Laut Maluku. Sebelah selatan adalah perairan yang merupakan selat antara Pulau Bangka dan bagian ujung utara Pulau Sulawesi, yaitu Selat Likupang. Sebelah barat masih dalam wilayah perairan sedang yaitu selat antara Pulau Bangka dengan Pulau Talise, yaitu Selat Talise. Namun di bagian utara Pulau Bangka merupakan perairan dalam yang berbatasan langsung dengan Samudera Pasifik. Hal inilah yang menyebabkan sedikit perbedaan kondisi ombak di bagian utara dengan semua wilayah Pulau Bangka lainnya. Karena berbatasan langsung dengan lautan lepas, perairan di utara Pulau Bangka memiliki karakteristik ombak lebih kencang dan lebih besar. Walaupun demikian, sebenarnya kondisi seperti ini lebih menguntungkan bagi para nelayan. Karena hasil laut yang diperoleh jauh lebih besar dalam segi ukuran (*size*), namun resiko yang ditimbulkan juga cukup besar dengan masih sederhananya peralatan yang digunakan para nelayan tersebut.



**Gambar 13.** Kondisi ombak di pesisir Desa Lihunu  
Sumber: Data primer penelitian, 2011

Hal demikian seharusnya menjadi titik awal untuk masyarakat mulai beralih ke sektor pariwisata untuk dikembangkan. Potensi yang cukup besar dapat dilakukan di bagian utara Pulau Bangka ini ditinjau dari karakteristik sumber daya alamnya adalah wisata memancing. Kegiatan memancing (*fishing*) sebagai bentuk wisata sangat didukung oleh kondisi perairan di bagian utara Pulau Bangka ini.

#### **4.3.3 Kondisi terumbu karang dan bebatuan**

Dengan kondisi perairan tenang dan kualitas yang masih baik, yang dibuktikan dengan mudahnya nelayan mendapatkan tangkapan berupa ikan-ikan karang dengan menggunakan peralatan tradisional, hal ini membuktikan pula bahwa kondisi tersebut mendukung keberadaan, bertumbuh dan berkembangnya terumbu karang dalam perairan di wilayah pesisir Desa Lihunu. Selain itu hasil penelitian di lokasi menunjukkan bahwa terumbu karang di perairan ini masih bagus dan dapat disaksikan langsung dari permukaan melalui perahu dengan jarak pandang hingga kedalaman kurang lebih 8 meter.

Dari hasil pengumpulan data yang didapatkan dari Mimpi Indah Resort selaku salah satu pengelola usaha wisata *diving*, diperoleh beberapa dokumentasi yang menunjukkan kondisi terumbu karang yang masih lestari di perairan pesisir Desa Lihunu. Dokumentasi ini didapatkan dari pengambilan

gambar di beberapa titik menyelam (*spot diving*) yang menjadi andalan obyek wisata *resort-resort* di wilayah Pulau Bangka.



**Gambar 14.** Kondisi terumbu karang di perairan Pulau Bangka  
Sumber: Data primer penelitian, 2011



**Gambar 15.** Keberadaan ikan karang pada ekosistem terumbu karang di perairan Pulau Bangka  
Sumber: Data primer penelitian, 2011

Kondisi bebatuan di permukaan perairan di Pulau Bangka yang masuk dalam wilayah administratif Desa Lihunu memiliki kenampakan yang unik dan mempesona. Sebagian wilayah masuk dalam perairan sedang, dan bagian lainnya berbatasan langsung dengan lautan lepas, Samudera Pasifik. Hal ini menimbulkan kenampakan bebatuan karang (*hard rock*) beragam dan unik

serta mempesona. Kenampakkan alam yang begitu menonjol keunikannya dan banyak menarik pengunjung adalah kenampakkan batuan karang Batu Gosoh.



**Gambar 16.** Tekstur Batu Gosoh

Sumber: Data primer penelitian, 2011

Batu Gosoh ini terlihat menarik karena terlihat dua buah batuan karang besar yang seperti sengaja ditumpuk satu dengan yang lain, sedemikian rupa tanpa adanya bantuan perekat atau pengikat berupa apapun. Dan hal ini terjadi sedemikian rupa tanpa ada campur tangan dari siapapun, lebih karena faktor alam. Tidak ada kepercayaan pada hal gaib atau mitos di masyarakat Pulau Bangka tentang hal ini. Mereka lebih berpendapat hal ini bisa terjadi karena kebesaran kuasa Tuhan Yang Maha Esa.

Kenampakan batuan karang unik yang paling menonjol lainnya adalah yang disebut Batu Puhikang. Batu Puhikang atau Taturuga (penyu), berasal dari Bahasa Sanguhe. Asal mula nama batu ini karena memiliki bentuk seperti penyu, dan terletak di dekat lokasi Tanjung Batu Gosoh, Panjang batu ini kurang lebih 30 m, dengan ketinggian kurang lebih 20 m, diatas batu ini memiliki pohon cemara. Dan dipercaya oleh masyarakat sekitar bahwa dahulunya tempat ini adalah habitat penyu-penyu Pulau Bangka yang banyak ditemukan di sekitar

pulau ini. Namun dari hasil penelitian diketahui bahwa populasi penyu tersebut semakin menurun dan jarang ditemukan keberadaannya sekarang.

#### 4.3.4 Kondisi flora dan fauna

Meskipun termasuk dalam wilayah pesisir, namun sebagian besar wilayah di Pulau Bangka khususnya Desa Lihunu merupakan tanah yang subur untuk lahan pertanian. Vegetasi yang dapat tumbuh di wilayah ini tidak hanya didominasi oleh satu jenis tanaman saja. Sehingga potensi dari hasil bumi (tanah) di Desa Lihunu ini juga cukup besar. Komoditi utama tanah pertanian atau perkebunan di Pulau Bangka adalah kopra. Hal ini dikarenakan banyaknya tanaman pohon kelapa yang selayaknya di daerah pesisir, tumbuh subur dan cukup luas arealnya. Sedikitnya ada dua per tiga bagian dari setiap wilayah pantainya yang terdapat pohon kelapa. Selain untuk dimanfaatkan sebagai kopra, wilayah seperti ini cukup potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu wahana wisata. Belum lagi di daerah perkebunan yang letaknya lebih jauh masuk ke daratan yang merupakan kawasan hutan, pohon kelapa tumbuh sangat subur dan berjumlah banyak. Namun hingga saat ini dari hasil penelitian didapatkan bahwa pemanfaatannya belum mencapai titik optimal. Karena rendahnya pula pengetahuan masyarakat lokal untuk pemanfaatan pohon kelapa ini ke sektor lain, selain kopra.

Di samping itu, dari penelitian didapat bahwa ternyata pohon kayu merah cukup besar terdapat di wilayah Pulau Bangka. Pohon kayu merah ini biasa dipakai untuk bumbu penambah cita rasa masakan yang khas layaknya kayu manis umumnya, dan dipercaya sebagai bahan obat untuk penyakit seperti kanker. Namun belum ada penelitian ilmiah lebih lanjut tentang kebenaran hal ini. Akan tetapi pada kenyataannya dari hasil wawancara didapatkan bahwa pada sebagian masyarakat desa yang menggunakan tanaman ini sebagai bahan obat mampu menyembuhkan penyakit yang dideritanya.

Vegetasi atau tanaman lain yang cukup banyak arealnya dan tumbuh subur di wilayah Desa Lihunu adalah bambu. Dalam bahasa setempat biasa disebut dengan *bulu*. Bambu yang merupakan tumbuhan tropis yang banyak tersebar di Indonesia merupakan bahan kayu untuk membuat peralatan-peralatan kehidupan sehari-hari. Di wilayah Desa Lihunu ini masyarakat memanfaatkan batang bambu yang diolah (dipotong dan dirapikan) sedemikian rupa menjadi bubu sebagai alat tangkap para nelayan. Bubu dalam bahasa lokal Pulau Bangka disebut dengan *igi*.

Selain tanaman-tanaman tersebut, tanaman yang banyak dijumpai di wilayah Pulau Bangka dan sangat berpotensi adalah jambu mete. Pada sekitar tahun 1980-an pernah digalakkan program pemerintah untuk mengolah jambu mete, mulai dari menanam, memasyarakatkan jambu mete menjadi tanaman perkebunan, hingga sampai dalam tahap pengolahan dasar. Pada awalnya program ini cukup berjalan dengan semakin digemarinya mete sebagai bahan makanan di pasaran. Namun lambat laun hal ini kurang mendapat perhatian dan masyarakat lebih cenderung untuk tetap mengandalkan hasil laut dan kopra dari hasil kebun kelapa sebagai prioritas aktivitas kegiatan perekonomian mereka.

Di wilayah Desa Lihunu ini sebagian besar wilayahnya juga ditumbuhi rumput alang-alang. Sekitar sepertiga dari luas Pulau Bangka adalah padang rumput alang-alang yang berbatasan langsung dengan hutan alami. Padang rumput ini adalah habitat bagi rusa fauna asli Pulau Bangka. Dan pada musim-musim tertentu yaitu pada bulan Agustus masyarakat dulunya sering berburu rusa dengan cara memasang jebakan jerat di wilayah padang rumput alang-alang ini. Namun pada saat ini sebagai bentuk konservasi pelestarian fauna tersebut jarang ditemukan karena sudah dipindah habitatnya di daerah Bitung sebagai Suaka Marga Satwa.

Beralih di kawasan pesisir Pulau Bangka banyak ditemukan vegetasi yang pada umumnya berada di kawasan pasang surut laut, yaitu tanaman bakau. Lebih kurang seluas 32,5 hektar atau 2,4 km di seluruh pesisir Desa Lihunu ini banyak dijumpai tanaman bakau sebagai sabuk hijau wilayah pesisir. Artinya, bakau menjadi vegetasi endemik pesisir yang dapat menjaga lingkungan pesisir secara langsung. Yang paling utama dapat dirasakan adalah sebagai penjaga daratan dari abrasi gelombang besar perairan laut serta sebagai *spawning ground* bagi hewan-hewan di perairan Pulau Bangka.



**Gambar 16.** a). Pohon kelapa, b). Kopra, c). Jambu mete, d). *Bulu* (bambu), dan e). *Mangrove*

Sumber: Data primer penelitian, 2011

Di wilayah daratan, di wilayah Desa Lihunu yang berbatasan langsung dengan hutan alami memiliki potensi fauna yang beraneka ragam yang dapat dijadikan alternatif selain usaha perikanan, namun belum dikembangkan ke arah sektor pariwisata. Salah satu diantaranya adalah keberadaan rusa Pulau Bangka. Rusa disini adalah rusa-rusa liar yang sejak awal habitatnya berada di daratan Pulau Bangka. Hal ini karena di wilayah Pulau Bangka banyak terdapat areal padang rumput alang-alang sebagai habitat utama rusa. Namun karena adanya perburuan liar oleh masyarakat yang terjadi di era tahun 1990-an, rusa

ini semakin menurun populasinya. Dan akhirnya pada kurun waktu tahun 1995-2000 secara serentak rusa-rusa di Pulau Bangka ditangkap untuk kemudian dipindah habitatkan di suaka marga satwa Tandu Rusa di Bitung. Namun hingga saat ini di bulan-bulan tertentu yaitu bulan Agustus masih dapat dijumpai rusa yang ditangkap penduduk di padang alang-alang dengan menggunakan jerat. Jerat ini dipasang pada awal musim rusa yaitu sekitar bulan Agustus.

Selain rusa, fauna khas Sulawesi yang terkenal yaitu kuskus masih dapat dijumpai di pedalaman hutan alami di wilayah Desa Lihunu. Kuskus masih sering ditemukan di kawasan hutan alami di bagian pedalaman hampir seluruh wilayah Pulau Bangka. Bagi wisatawan yang datang dengan tujuan *tracking*, kuskus menjadi salah satu daya tarik yang diminati untuk disaksikan. Populasi kuskus sendiri kurang diketahui besarnya oleh masyarakat lokal. Namun, beberapa masyarakat lokal dan para wisatawan *tracking* masih dapat menjumpai keberadaannya ketika melakukan perjalanan di dalam hutan di Pulau Bangka.



**Gambar 18.** a). Rusa dan b). Kuskus  
Sumber: Data primer penelitian, 2011

Daya tarik lainnya di Pulau Bangka sebagai destinasi wisata tentu tidak lain adalah pemandangan bawah lautnya, terutama di wilayah perairan Desa Lihunu. Yang menjadi tujuan utama wisatawan datang melakukan *diving* adalah menyaksikan ikan-ikan karang yang masih banyak populasinya. Beraneka macam jenis ikan karang tropis masih dapat dijumpai keberadaan dan

populasinya di perairan Pulau Bangka. Ikan-ikan karang tersebut diantaranya adalah jenis ikan bedah (*surgeon fish*), jenis-jenis *trigger fish*, jenis-jenis *angel fish* serta ikan karang umumnya yaitu jenis-jenis *damsel fish*.

Untuk jenis ikan konsumsi yang melimpah untuk dijadikan komoditi perikanan tangkap maupun pembesaran di perairan Desa Lihunu adalah ikan kerapu, baronang, kakap merah, dan beberapa ikan karang lainnya. Ikan-ikan ini ditangkap dengan menggunakan peralatan yang masih tradisional seperti perangkap yang terbuat dari bambu (*bulu*) yaitu berupa bubu, atau yang biasa disebut dengan nama lokal *igi*.

Perairan Pulau Bangka memang memiliki kualitas perairan yang sangat baik untuk fauna yang hidup di air. Fauna langka yang sudah hampir punah keberadaannya namun masih dapat dijumpai di perairan Pulau Bangka adalah ikan duyung (*dugong*). Salah satu mamalia air yang merupakan fauna langka ini menjadi potensi utama untuk disaksikan wisatawan dalam tujuannya berwisata ke Pulau Bangka. Ikan duyung atau dugong di perairan Indonesia diketahui telah banyak menurun populasinya akibat menurunnya kualitas perairan habitat ikan tersebut terutama oleh karena pencemaran. Di perairan Pulau Bangka ikan ini dapat dijumpai tidak hanya dalam sekali waktu dalam menyelam. Tetapi masih dapat disaksikan secara berlanjut dengan kembali dilestarikannya populasi ikan duyung (*dugong*) sebagai upaya konservasi di perairan Pulau Bangka.



**Gambar 19.** a). *Damsel fish*, b). *Surgeon fish*, c). *Trigger fish*, d). Ikan bubara, e). Kakap merah, f). Dugong, dan g). Igi (bubu)  
Sumber : Data primer penelitian, 2011

#### 4.4 Sumber Daya Manusia

Kesadaran manusia akan pentingnya sumber daya manusia bukan hal yang baru. Samsudin (2006) menyatakan, manusia hidupnya selalu memikirkan cara memperoleh bahan pangan, sandang, dan papan. Peradaban manusia berpangkal pada usaha mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidupnya.

Dalam bahasan manajemen (pengelolaan) organisasi, sumber daya manusia adalah orang-orang yang merancang dan menghasilkan barang atau jasa, mengawasi mutu, memasarkan produk, mengalokasikan sumber daya finansial, serta merumuskan seluruh strategi dan tujuan organisasi. Tanpa orang-orang yang memiliki keahlian atau kompeten maka mustahil bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Sumber daya manusia inilah yang membuat sumber daya lainnya dapat berjalan (Samsudin, 2006).

Hal tersebut analogi dengan diperlukannya sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan sumber daya pesisir di Desa Lihunu. Potensi-potensi yang ada pada saat ini khususnya yang mengarah pada sektor perikanan dan pariwisata harus dapat dikombinasikan dengan baik oleh sumber daya manusia khususnya masyarakat lokal Desa Lihunu.

#### 4.4.1 Kemampuan Masyarakat dalam Berusaha

Menurut Soetomo (2009), dari sudut pandang sosial budaya, sumber daya manusia merupakan pelaku pembangunan dalam kapasitasnya sebagai individu dan anggota masyarakat yang meliputi kapasitas untuk memproduksi, pemerataan, pemberian kekuatan dan wewenang, kelangsungan untuk berkembang, dan kesadaran akan interdependensi.

Pada kondisi masyarakat sebagai nelayan, sumber daya manusia sebagai *stakeholder* utama pengelola sumber pesisir Desa Lihunu telah berhasil mengelola wilayahnya dengan sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan parameter besarnya hasil laut yang diperoleh. Pada setiap trip melaut, rata-rata penghasilan yang diperoleh setiap nelayan dapat mencapai 20 kg ikan-ikan karang, seperti ikan *bubara*, kakap merah, kerapu, dan cumi-cumi. Apabila dikonversikan dalam mata uang bernilai hampir Rp 300.000,00 dalam sekali melaut, yaitu per hari. Masyarakat lokal Desa Lihunu hanya menggunakan perahu tempel atau bahkan hanya perahu dayung dalam kegiatan ini, yang jaraknya tidak jauh dari pantai lebih kurang 1-1,5 mil laut. Artinya secara umum kondisi perairan di pesisir Desa Lihunu sangat baik, ditunjukkan dengan melimpahnya keaneka ragaman hayati perairan laut yang tidak jauh dari daratan pantai, khususnya hasil perikanan tangkap. Yang secara langsung maupun tidak langsung disadari masyarakat lokal terlibat dalam pengelolaannya. Nelayan-nelayan lokal ini menggunakan pancing ulur dan *igi* (bubu) yang ramah lingkungan dalam kegiatan penangkapan.

Dari hal tersebut dapat dikemukakan bahwa kondisi sumber daya alam yang sangat berpotensi pada sektor perikanan tangkap telah dapat dimanfaatkan masyarakat lokal dengan teknik dan sumber daya terampil yang dimilikinya. Meskipun hanya dengan menggunakan peralatan yang terbatas akan tetapi mampu mengelola dengan sebaik-baiknya, dengan peralatan yang ramah lingkungan tersebut. Sehingga dapat memperoleh hasil yang dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka.

Pada sektor pariwisata, masyarakat di Desa Lihunu menunjukkan bahwa secara kuantitas sumber daya manusia di tempat ini sangat menunjang untuk kegiatan pengembangan pariwisata, selain kegiatan utama mereka sebagai masyarakat pesisir yaitu sebagai nelayan. Sumber daya manusia secara kuantitas sangat potensial untuk terlibat langsung dan memegang peranan penuh dalam pengelolaan wisata. Namun ditinjau dari segi kualitas dan kemampuan aktualisasi diri serta partisipasinya, masih rendah.

Seperti yang telah dijelaskan bahwa secara historis masyarakat lokal yang bermukim di Desa Lihunu merupakan penduduk asli yang sudah lama menghuni Desa Lihunu, mulai dari masa membuka wilayah tersebut pertama kali hingga saat ini. Namun demikian, hal itu bukan merupakan suatu jaminan bahwa mereka mampu menjadi pemandu wisata yang profesional untuk wisatawan yang berkunjung ke wilayah Pulau Bangka, khususnya Desa Lihunu. Banyak dari mereka yang ingin menjadi pemandu, namun gagal karena tidak memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan ini, khususnya faktor kemampuan berkomunikasi. Hal senada dikemukakan Bapak Lansus Ruitang pada tanggal 22 November 2011, sebagai berikut:

Kalau dilihat sumber daya alam dan budaya di daerah kita, sebenarnya bisa dikembangkan ke sektor wisata. Kuncinya adalah masalah pendidikan termasuk masalah guru, misalnya di sekolah kita (SMP) belum ada guru khusus yang mengajar bahasa Inggris. Jadi tantangan ke depan bagaimana kita menyiapkan anak-anak yang memiliki kemampuan seperti

bahasa Inggris sehingga mereka bisa dilibatkan dalam pengembangan wisata.

Faktor lain yang mempengaruhi adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang sumber daya wisata baik wisata alam maupun budaya dan seni yang tersedia di wilayah Desa Lihunu sehingga sulit menjelaskan kepada para wisatawan yang berkunjung. Hal ini diperkuat penuturan tokoh pendidikan perempuan (guru) di Desa Lihunu Ibu Hudia Tatibas yang mengikuti pada 21 November 2011, menyatakan:

Mengapa masih rendahnya peran serta masyarakat sini dalam kepariwisataan oleh karena SDM disini masih rendah. SDM rendah dikarenakan diperoleh dari pendidikan sekolah. Dari dulu kala desa ini menelorkan SDM yang katakanlah seperti Bapak yang ada di depan ini, hanya dapat dihitung dengan jari. Paling tidak cuma sarjana yang sarjana pendidikan, bukan yang bisa menggali secara langsung sektor pariwisata. Memang perlu adanya pendidikan dalam sektor pariwisata.

Oleh karena itu, masyarakat pesisir Desa Lihunu perlu membentuk dan meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti program pelatihan, bimbingan-bimbingan, dan penyuluhan-penyuluhan yang ketersediaannya diusahakan oleh pemerintah setempat melalui program-program kerjasama dengan instansi terkait. Dengan kegiatan seperti itu diharapkan masyarakat lokal akan mampu mengaktualisasikan diri dalam kegiatan pariwisata. Kesadaran masyarakat lokal untuk meningkatkan kemampuan dirinya, merupakan salah satu bentuk partisipasi dasar yang sangat penting artinya dalam meningkatkan kualitas pengelolaan Pulau Bangka khususnya Desa Lihunu menjadi destinasi wisata yang dikenal dan diminati para wisatawan baik mancanegara maupun domestik.

#### **4.4.2 Pendidikan Masyarakat**

Sebenarnya secara umum kemampuan masyarakat Desa Lihunu dalam menanggapi suatu keadaan secara pendidikan dapat dikatakan telah jauh dari kata tertinggal, atau dapat dikategorikan masyarakat berpendidikan. Artinya, mayoritas masyarakat mampu menanggapi dan memahami situasi desanya baik

secara sosial maupun ekonomi dengan konsep-konsep masyarakat berpendidikan. Segala sesuatu permasalahan dipecahkan diawali dengan proses musyawarah masyarakat dalam naungan Badan Perwakilan Desa setempat, dan hampir tidak pernah ada konflik atau gesekan fisik dan penyelesaian permasalahan tersebut walaupun banyak terjadi perbedaaan dan saling berpegang masing-masing pendapat.

Masyarakat di Desa Lihunu pada umumnya berpendidikan terakhir tamat Sekolah Dasar atau masih tergolong tingkat pendidikan rendah secara formal sehingga hal ini menyebabkan mereka memiliki pemahaman yang terbatas tentang pengelolaan dan pengembangan sumber daya di kawasannya. Rendahnya tingkat pemahaman tersebut juga mempengaruhi kurangnya interaksi dengan pihak investor yang ingin mengembangkan potensi yang ada di Desa Lihunu.

Sehingga, jika masyarakat diarahkan pada pemikiran bahwa program pengembangan wisata dimulai dari, oleh, dan untuk masyarakat maka akan dapat terwujud peran serta masyarakat secara lebih aktif. Berkaitan dengan hal ini, maka diperlukan suatu upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pariwisata melalui suatu proses yang dilakukan secara perlahan atau bertahap. Data keadaan penduduk Desa Lihunu berdasarkan tingkat pendidikannya tersaji pada Tabel 5 berikut ini :

**Tabel 5.** Keadaan Penduduk Desa Lihunu Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2010

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak pernah bersekolah (buta aksara)	289
2	Tidak pernah bersekolah (tidak buta aksara)	102
3	Tamat SD/ sederajat	447
4	Tamat SMP/ sederajat	129
5	Tamat SMA/ sederajat	106
6	Tamat D1	1
7	Tamat D3	2
8	Tamat S1	2
9	Tamat S2	1
Jumlah		1073

Sumber: Diolah dari Anonymous, 2010

. Pendidikan masyarakat Desa Lihunu, terutama nelayan umumnya Sekolah Dasar dan SMP tidak tamat. Pengalaman nelayan dalam penyediaan jasa wisata bahari berkisar antara 5 hingga 6 tahun. Nelayan terlibat dalam pengelolaan wisata bahari didorong oleh upaya peningkatan pendapatan, dan merupakan pengaman ketika hasil penangkapan ikan rendah. Makna hal ini adalah nelayan dapat diarahkan melakukan perilaku positif dengan meningkatkan kualitas pendidikan (formal maupun non formal) baik dari faktor internal maupun eksternal. Secara sinergis perlu dilaksanakan fasilitasi terhadap nelayan dalam melaksanakan usahanya yang didasarkan pada faktor internal.

Sampai tahun 2011, di Desa Lihunu hanya terdapat 1 Sekolah Dasar (SD) dan 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sedangkan Sekolah Menengah Atas (SMA) berada di ibukota kecamatan yaitu di Tatelu, yang jaraknya 40 mil laut atau sekitar 1-2 jam perjalanan ditempuh dengan perahu motor. Hal seperti

iniilah yang menjadi kendala penduduk Desa Lihunu untuk mendapatkan pendidikan formal yang tinggi.

Untuk itu, diperlukan suatu kebijakan dari *stakeholders* terkait untuk melakukan upaya meningkatkan pemahaman masyarakat. Program atau kebijakan tersebut ditujukan untuk memberikan pengarahan dan pemahaman masyarakat dalam usaha pariwisata, yang berupa keterampilan kerja meskipun bukan pendidikan formal yang menunjang dalam bidang perikanan dan pariwisata.

Seperti manajerial yang telah dilakukan oleh salah satu pengusaha wisata, yaitu Mimpi Indah Resort di Desa Lihunu, pemilik yang merupakan pasangan suami istri Belanda-Toraja tersebut mewajibkan setiap pekerjanya (yang hampir seluruhnya adalah masyarakat lokal) untuk mengikuti kursus Bahasa Inggris tiap 1 atau 2 minggu sekali untuk meningkatkan *softskill* walaupun bukan dari pendidikan formal. Disampaikan oleh Ulva, pemilik Mimpi Indah Resort bahwa :

sampai saat ini masih sementara mencari untuk orang bekerja di restoran masih training,, ada terus kan karena...  
Bukan cuma makanannya,, tapi kan harus bisa ngobrol,melayani tamu...ini masak apa?setidaknya ini masakan ini, kan pake makanan tradisional,, itu yang perlu biasa kami jelaskan kase training,, saya biasanya ke karyawan kase pelatihan bahasa inggris..

(sampai saat ini masih mencari untuk orang bekerja, training ada terus di restoran karena selalu didatangi pengunjung  
Bukan hanya makanannya, tetapi harus bisa berkomunikasi melayani tamu, ketika ditanya masakan apa?setidaknya bisa menjawab ini makanan tradisional, itu yang perlu kami berikan training, pelatihan bahasa inggris)

Hal seperti ini belum dilakukan oleh instansi terkait, sehingga pengembangan pariwisata pada masyarakat pesisir Desa Lihunu belum dapat sangat jauh dari optimal. Dan sangat urgen untuk dilakukan peningkatan kompetensi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir ke arah sektor pariwisata.

#### 4.5 Sosial, Budaya, dan Ekonomi Masyarakat Desa Lihunu

##### Kondisi Sosial Masyarakat

Secara struktur sosial masyarakat di Desa Lihunu dapat dibagi menjadi 3 bagian status dalam kemasyarakatan, yaitu masyarakat pemerintah (baik dari penduduk lokal/asli maupun penduduk dari luar Desa Lihunu), masyarakat pendatang (para investor dan orang yang berkunjung ke Desa Lihunu untuk tujuan tertentu), dan masyarakat biasa yang merupakan penduduk asli yang secara turun-temurun telah mendiami lingkungan di Desa Lihunu atau lebih dikenal dengan sebutan masyarakat lokal.

Hubungan antar individu dalam kelompok masyarakat tersebut saling berelasi dalam segala aktivitasnya sehari-hari. Salah satu individu dari kelompok tidak dapat saling lepas dalam beraktivitas. Dalam kehidupan kemasyarakatan sehari-hari, masyarakat lokal dengan statusnya sebagai petani, nelayan, pedagang, dan bahkan sebagai PNS (guru), ruang lingkup aktivitasnya masih terbatas pada pekerjaan masing-masing. Belum ada pemikiran yang lebih luas untuk pengembangan potensi yang tersedia khususnya ke sektor perikanan-pariwisata. Sedangkan individu yang berstatus sebagai masyarakat pemerintah desa juga hanya terbatas pada relasi mereka sebagai pejabat desa dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan pemerintah desa. Artinya belum ada relasi yang lain yang mengarah pada pengembangan sektor perikanan dan pariwisata yang dikombinasikan, bersama-sama kelompok masyarakat lainnya dengan memanfaatkan potensi yang ada. Dari data yang berhasil dihimpun peneliti ditemukan bahwa sebagian besar dari pemerintah desa masih terpusat pada instruksi daerah (kabupaten) dalam pelaksanaan program, belum memiliki relasi tersendiri dalam pengembangan potensi yang ada. Sehingga terkesan hanya sebagai pelaksana teknis program khususnya pengembangan pariwisata. Masyarakat yang termasuk kelompok masyarakat pemerintah desa ini akan

kembali pada status seperti kelompok masyarakat lokal atau masyarakat biasa jika sudah terlepas atau selesai melaksanakan kegiatan pemerintahan sesuai jabatan masing-masing. Mereka melakukan aktivitas rutin sebagai petani, nelayan, berdagang, dan sebagainya.

Kelompok masyarakat yang merupakan masyarakat biasa, dapat dikatakan merupakan *stakeholder* utama dalam pengelolaan dan pengembangan potensi perikanan dengan konsep kepariwisataan. Yaitu dalam bentuk partisipasi yang diharapkan sejak awal perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Sebagaimana dikemukakan Damanik dan Weber (2006), masyarakat lokal terutama penduduk asli yang bermukim di kawasan wisata, menjadi salah satu pemain kunci dalam pengembangan pariwisata karena sesungguhnya merekalah yang akan menyediakan sebagian besar atraksi sekaligus menentukan kualitas produk wisata. Selain itu masyarakat lokal merupakan "pemilik" langsung atraksi wisata yang dikunjungi sekaligus dinikmati wisatawan. Perubahan-perubahan di kawasan wisata akan bersentuhan secara langsung dengan kepentingan mereka. Oleh karena itu, pemanfaatan sumberdaya untuk pembangunan wisata berkelanjutan harus melibatkan masyarakat lokal dan memberikan manfaat optimal bagi mereka. Besar kecilnya partisipasi yang diberikan masyarakat antara lain dapat dilihat dari kemampuan pemahaman pada setiap tingkatan kebijakan publik yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan wisata.

Di samping kelompok masyarakat pemerintahan desa dan masyarakat lokal atau masyarakat biasa, di Desa Lihunu terdapat kelompok masyarakat pendatang. Masyarakat pendatang inilah yang merupakan individu-individu pelaku usaha yang ada sekarang, khususnya usaha wisata. Mereka adalah individu-individu pemilik sekaligus pengelola usaha wisata yang ada sekarang di kawasan Desa Lihunu. Relasi antar individu masyarakat ini kurang begitu erat demikian juga dalam ikatan kehidupan bermasyarakat secara umum. Relasi yang

terbentuk hanya sebatas relasi bisnis atau hubungan perkumpulan antar pengusaha pariwisata. Demikian pula hubungan antara individu pelaku usaha wisata ini dengan kelompok masyarakat lainnya yaitu masyarakat pemerintahan desa dan masyarakat lokal. Relasi antara keduanya adalah sebatas hubungan kerja. Hubungan kerja dengan masyarakat pemerintahan desa seperti pengurusan perijinan akta tanah yang digunakan untuk usaha wisata. Sedangkan hubungan kerja dengan masyarakat lokal adalah dengan memanfaatkan jasa atau tenaga masyarakat lokal sesuai kemampuan dan keterampilan dalam bidang masing-masing tenaga kerja yang digunakan.

Berdasarkan data yang diperoleh, penyerapan tenaga kerja pada usaha wisata khususnya resort yang sedang beroperasi, masih sangat sedikit. Demikian juga variasi pekerjaan yang dapat dilakukan sangat terbatas pada sektor pertukangan dan buruh yang digeluti oleh tenaga kerja laki-laki, sedangkan tenaga kerja wanita dipekerjakan pada bagian masak memasak dan pelayan restoran. Menurut Ulva, pemilik usaha wisata di kawasan Desa Lihunu menyampaikan:

Pendekatan kita pertama waktu itu..kan disini di kampung ada 6 gereja,, bekerja sama dengan jemaat...gantian datang bantu baku bersih dank,, itu yang bisa kita libatkan,, untuk tenaga kerja kami berusaha mengambil sebanyak mungkin saya libatkan karena satu keuntungannya mereka yang paling dekat

Kemudian tujuan kami kan mau berbagi...apa yang kami miliki,, sesuai kemampuan kami dan mereka mampu lakukan,, seperti kami cari sesuai yang mampu mereka lakukan ada yang bisa bikin atap...

Pada keadaan yang demikian terjadi hubungan yang bertentangan antara masyarakat lokal dengan investor selaku pemilik modal dalam usaha wisata, dalam hal ini dianalogikan belum terjadi simbiosis mutualisme. Pada satu sisi masyarakat lokal sangat berpotensi secara kuantitas dalam pengelolaan pariwisata. Sedang pada sisi lain mereka belum mencapai kualitas yang diinginkan oleh pemilik modal usaha wisata yang pada kondisi ini berusaha

memajukan potensi wisata yang ada di Desa Lihunu. Pada akhirnya jalan tengah yang dilakukan dari kondisi tersebut adalah seperti yang telah disampaikan di atas, yaitu memanfaatkan jasa atau tenaga masyarakat lokal sesuai dengan kemampuan dan keterampilan dalam bidang masing-masing yang dimiliki.

### **Budaya dan Seni dalam Masyarakat**

Potensi budaya dan seni yang dimiliki masyarakat dapat menjadi salah satu indikator kualitas sumber daya manusia pada suatu wilayah. Menurut Koentjaraningrat (1990) setiap manusia yang hidup dalam pergaulannya selalu memiliki budaya. Budaya tersebut sebagai perilaku manusia, dipelajari, dianut, dan dilaksanakan dengan kepercayaan penuh serta diteruskan dari suatu generasi kepada generasi berikutnya. Budaya adalah singkatan dari kebudayaan yang berasal dari kata Sansekerta budhayah yaitu bentuk jamak dari budi atau akal. Oleh sebab itu maka kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan akal.

Budaya sangat penting peranannya dalam pariwisata. Budaya menjadi salah satu daya tarik yang menyebabkan orang ingin melakukan sebuah perjalanan wisata. Daya tarik tersebut adalah adanya keinginan untuk melihat cara hidup dan budaya orang lain, serta adanya maksud untuk mempelajari budaya orang lain. Industri pariwisata mengakui bahwa peran budaya sebagai faktor penarik, dengan mempromosikan karakteristik budaya dari destinasi wisata. Sumber daya berupa budaya dimungkinkan untuk menjadi faktor utama yang menarik wisatawan untuk melakukan perjalanan wisata.

Menurut Pitana dan Diarta (2009), pariwisata budaya dapat dilihat sebagai peluang bagi wisatawan untuk mengalami, memahami, dan menghargai karakter, kekayaan dan keragaman budaya dari suatu destinasi wisata. Pariwisata budaya memberikan kontak pribadi secara langsung dengan masyarakat lokal kepada individu yang memiliki pengetahuan khusus tentang suatu objek budaya.

Wisatawan domestik maupun internasional melakukan perjalanan atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidupnya dengan jalan mengadakan kunjungan atau peninjauan ke tempat lain, mempelajari keadaan masyarakat, kebiasaan dan adat istiadat, cara hidup seni dan budaya. Dalam kegiatan tersebut tujuannya adalah memahami makna suatu budaya dibandingkan dengan mendeskripsikan atau melihat daftar fakta yang ada mengenai suatu budaya. Selanjutnya, sumber daya budaya yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata adalah sebagai berikut :

1. Bangunan bersejarah, situs, monumen, museum, galeri seni, situs budaya kuno dan sebagainya.
2. Seni dan patung kontemporer, arsitektur, tekstil, pusat kerajinan tangan dan seni, pusat desain, dan sebagainya.
3. Seni pertunjukan, drama, sendratari, lagu daerah, festival dan even khusus.
4. Peninggalan keagamaan, pura, candi, masjid, situs dan sejenisnya.
5. Kegiatan dan cara hidup masyarakat lokal, sistem pendidikan, sanggar, teknologi tradisional, cara kerja dan sistem kehidupan setempat.
6. Perjalanan (tracking) ke tempat bersejarah menggunakan alat transportasi unik (berkuda, dokar, cikar, dan sebagainya)
7. Kuliner (masakan) setempat, melihat persiapan, cara membuat, menyajikan dan menyantapnya, merupakan atraksi budaya yang sangat menarik wisatawan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua potensi budaya dan karya seni yang dimiliki masyarakat Pulau Bangka dapat dikembangkan ke arah sektor pariwisata. Potensi budaya/seni yang dimaksud meliputi upacara adat/budaya dan seni yang dimiliki dan makna dari upacara adat tersebut serta atraksi seni

yang menyertai pelaksanaannya. Adapun jenis budaya/seni yang dimiliki Masyarakat Pulau Bangka adalah sebagai berikut:

#### 1. Pesta Adat Tulude

Pesta Adat Tulude adalah suatu acara adat yang dilaksanakan masyarakat Pulau Bangka setiap tahun yaitu setiap tanggal 31 Januari atau dikenal juga dengan sebutan "pesta adat pisah tahun". Kata "Tulude" berasal dari bahasa Sengihe "sulude" atau 'me-nulude', yang berarti "menolak", maksudnya menulude atau menolak tahun yang lama dan menyambut tahun yang baru. Oleh karena itu, makna pesta adat Tulude adalah menolak (melepas) tahun yang lama sambil memanjatkan puji syukur dan ungkapan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai sumber kehidupan yang sudah memelihara dan memberi berkat sepanjang tahun yang berlalu dan "menerima" tahun yang baru disertai permohonan akan pemeliharaan dan berkat Tuhan pada tahun yang baru dijalani. "Menolak" tahun yang lama sekaligus bermakna menolak semua hal buruk khususnya bencana-bencana yang telah terjadi pada tahun yang lalu dan memohon agar semua hal yang buruk tersebut tidak terjadi pada tahun yang baru dijalani.

Pesta adat Tulude ini merupakan satu rangkaian acara yang di dalamnya terdapat beberapa atraksi kesenian seperti tari Cakalele (tarian pedang) yang dibawakan oleh laki-laki dan tari Gunde (tarian adat yang diiringi musik gendang) yang dibawakan oleh kaum perempuan. Acara diawali pada tanggal 30 Januari yaitu pengambilan kue-kue keluarga (kue yang dibuat tiap keluarga terbuat dari bahan beras ketan merah dicampur gula aren, dalam bahasa Siau dinamakan kue "dodol"). Pengambilan kue-kue keluarga diiringi tarian Cakalele dengan musik gendang yang dibawakan oleh anak-anak remaja laki-laki. Dibelakang iring-iringan tarian Cakalele diikuti oleh iring-iringan masyarakat naik turun rumah untuk mengambil kue-kue tersebut dan setelah semua kue keluarga diambil

kemudian disatukan dengan kue adat raja besar yang terdapat di rumah kepala desa/hukum tua. Pembuatan kue adat raja besar dilakukan sejak tanggal 29 Januari atau 2 hari sebelum acara puncak pada tanggal 31 Januari.

Pesta adat tahunan Tulude dilaksanakan berlokasi di sepanjang jalan desa dengan mendirikan "sabuah" (bangunan sementara) sepanjang 250 meter. Acara dimulai pukul 09.00 waktu setempat berdasarkan urutan acaranya dan acara puncak berlangsung sekitar pukul 15.00, yaitu acara pemotongan kue adat besar. Setelah semua acara pemotongan kue adat selesai kemudian dilanjutkan sambutan wajib dari pemerintah (hukum tua), dilanjutkan dengan acara ramah tamah dimulai sekitar pukul 16.00 yang diawali dengan pembagian kue adat kepada pemerintah, tokoh masyarakat dan tua-tua adat. Pelaksanaan pesta adat Tulude dengan rangkaian acara kesenian lainnya yang diadakan setiap tahun oleh masyarakat Desa Lihunu sama sekali tidak memiliki hubungan dengan suatu mitos atau hal-hal lain yang berhubungan dengan gaib (diluar logika manusia). Hajatan ini merupakan warisan budaya nenek moyang secara turun temurun sebagai bentuk pernyataan rasa syukur terhadap nikmat dan berkat Tuhan Yang Maha Esa.

## 2. Kesenian Masamper

Acara masamper merupakan rangkaian pesta adat Tulude yang dilaksanakan pada keesokan harinya yaitu tanggal 1 Pebruari. Masamper merupakan salah satu kesenian khas suku Siau yaitu suatu tarian yang menceritakan tentang aktivitas masyarakat nelayan yang sedang mencari ikan dengan cara menarik jalah (soma). Masamper ini dibawakan oleh kelompok laki-laki yang beranggotakan 18-20 orang, sesuai dengan kebiasaan pada saat mencari ikan dengan cara menggunakan soma, para nelayan melakukannya dengan cara berkelompok 18-20 orang dalam satu perahu. Sebagai rangkaian pesata Tulude, biasanya Masamper ini dapat ditampilkan hingga dua hari dua

malam sebagai bentuk ucapan syukur atas suksesnya pelaksanaan pesta adat Tulude.



**Gambar 20.** Dokumentasi Pesta Adat Tulude  
Sumber : Data Dinas Budpar Kabupaten Manahasa Utara, 2011

### Kondisi Ekonomi Masyarakat

Selain menjadi nelayan sebagai mata pencaharian utama penduduk, sektor pertanian (khususnya hasil kebun) adalah aktivitas ekonomi penting sesuai dengan kondisi fisiografis Desa Lihunu sehingga menjadi alternatif mata pencaharian yang banyak digeluti masyarakat. Para penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan umumnya adalah mereka yang masih berusia rata-rata di bawah 40 tahun dan masih banyak menggunakan alat semi-tradisional, dengan jaring berperahu yang disebut *pelang* dengan menggunakan motor tempel, bahkan sebagian nelayan masih menggunakan perahu tanpa motor (dayung).

Menurut Ningsih (2005) dalam Putra sumber daya perikanan laut dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok besar yaitu: (1) sumber daya ikan demersal, yaitu jenis ikan yang hidup di atau dekat dasar perairan; (2) sumber daya ikan pelagis, yaitu jenis sumber daya ikan yang hidup di sekitar permukaan perairan; (3) sumber daya ikan pelagis besar, yaitu jenis ikan oceanik seperti tuna, cakalang, tenggiri dan lain-lain; (4) sumber daya udang dan biota laut non ikan lainnya seperti kuda laut.

Untuk jenis ikan konsumsi yang melimpah untuk dijadikan komoditi perikanan tangkap maupun pembesaran di perairan Desa Lihunu adalah ikan kerapu, baronang, kakap merah, dan beberapa ikan karang lainnya. Ikan-ikan ini ditangkap dengan menggunakan peralatan yang masih tradisional seperti perangkap yang terbuat dari bambu (*bulu*) yaitu berupa bubu, atau yang biasa disebut dengan nama lokal *igi*. Pada setiap trip melaut, rata-rata penghasilan yang diperoleh setiap nelayan dapat mencapai 20 kg ikan-ikan karang, seperti ikan *bubara*, kakap merah, kerapu, dan cumi-cumi. Apabila dikonversikan dalam mata uang bernilai hampir Rp 300.000,00 dalam sekali melaut, yaitu per hari dengan biaya operasional lebih kurang Rp 150.000,00. Sedangkan penduduk yang mengelola lahan pertanian adalah mereka yang tidak memiliki perahu sendiri dan kurang memiliki kemampuan, pengetahuan dan keterampilan dalam aktivitas nelayan. Berkaitan dengan hal ini, pendapat dari Ambi selaku tokoh nelayan di Desa Lihunu pada wawancara yang dilakukan pada tanggal 20 November 2011, menyatakan:

Pada musim melaut, seperti bulan-bulan April sampai Agustus sebelum musim angin, torang gunakan perahu yang muat 1-2 orang bikin pancing cumi kah...bubara...macam begitu. Dari hasil tiap hari paling ya.. sekitar 300 ribu sekali melaut. Tapi itu belum dipotong beli minyak... perbaiki pancing macam-macam begitu

(Pada musim melaut, seperti bulan-bulan April sampai Agustus sebelum musim angin, kita para nelayan menggunakan perahu yang cukup untuk 1-2 orang untuk memancing seperti cumi-cumi, ikan bubara. Dari hasil tiap hari paling sekitar 300 ribu sekali melaut. Tapi itu belum dipotong beli biaya membeli bahan bakar, memperbaiki pancing dan semacamnya.)

Secara umum kehidupan perekonomian masyarakat Desa Lihunu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, dapat dikatakan cukup terpenuhi sesuai kebutuhan masing-masing. Indikator yang dapat ditunjukkan adalah keadaan material yang dimiliki masyarakat dapat dikategorikan sebagai masyarakat mampu dalam segi ekonomi. Namun untuk diarahkan ke sektor pariwisata secara langsung, baik dalam relasi dengan investor maupun dari swadaya masyarakat

lokal, faktor kemampuan ekonomi menjadi salah satu kendala dalam melakukan usaha wisata secara perseorangan. Paradigma yang ada pada masyarakat adalah bahwa yang dimaksud pengembangan pariwisata oleh masyarakat, seluruhnya biaya dibebankan pada masyarakat lokal (swadaya). Berkaitan dengan hal di atas, beberapa pendapat dari wawancara yang dilakukan pada tanggal 20 November 2011, kepada Bapak Wemprit Bawole, selaku tokoh masyarakat, menyatakan:

Yang menjadi masalah adalah kurang permodalan. Karena bagaimanapun kita punya sumber daya alam yang bagus, dan budaya yang bagus tapi untuk mengembangkan hal seperti itu susah adalah masalah permodalan. Apakah ini menurut pemerintah atau barangkali ke dinas atau Kadis Pariwisata Minahasa Utara. Pemerintah ada renstra dan program pariwisata, mungkin bisa dibicarakan tentang permodalan dengan masyarakat disini. Seperti saya ini barangkali pernah memiliki wilayah yang berpotensi, tapi mau bagaimana tidak ada modal. Barangkali itu yang menjadi kendala dalam pengembangan pariwisata.

Masalah kurangnya modal atau masalah ekonomi dikemukakan pula oleh Bapak Benyamin Takumansang, pada tanggal 22 November 2011, sebagai berikut:

Menurut saya bagaimanapun kalau ekonomi rendah akan sulit bagi kita mengembangkan pariwisata ini secara mandiri. Misalnya untuk mengolah lokasi-lokasi yang boleh kita tata, diperlukan biaya yang besar untuk mengumpulkan bahan-bahan dan membayar tukang membangun cottage yang bervariasi, menyiapkan tukang masak sesuai selera wisatawan. Jadi kalau berbicara pengembangan wisata yang penting menurut saya adalah masalah ekonomi.

Faktor inilah yang antara lain menjadi penyebab rendahnya peran serta masyarakat dalam pengembangan wisata di Pulau Bangka, khususnya Desa Lihunu. Faktor material atau kemampuan ekonomi yang dianggap sebagai kendala pengembangan pariwisata. Sehingga merasa berat untuk mengaktualisasi diri dalam usaha wisata.

Dengan adanya pengembangan wisata, khususnya wisata bahari di daerah pesisir maka masyarakat setempat dapat memperoleh manfaat secara ekonomi dari kehadiran wisata bahari di daerahnya tersebut dengan menjual jasa seperti

dijelaskan di atas. Namun demikian, dalam hal ini juga terdapat aspek-aspek sosial ekonomi yang bersifat positif dan negatif.

Dari analisis aspek sosial ekonomi yang bersifat positif adalah membantu pertumbuhan ekonomi dengan terciptanya lapangan kerja baru dan penambah sumber devisa negara dalam perekonomian makro. Kemudian dari aspek sosial adalah dengan semakin luasnya tatanan hubungan sosial serta meningkatkan visi dan cara pandang masyarakat lokal tanpa meninggalkan *local knowledge* yang dimilikinya. Sedangkan aspek sosial ekonomi yang bersifat negatif antara lain dengan meningkatkan pembangunan pariwisata secara langsung tanpa peran dan pemberdayaan masyarakat lokal, akan mempengaruhi struktur sosial dengan melebarnya kesenjangan sosial antara masyarakat lokal dan masyarakat investor. Dari hal tersebut dampaknya adalah mempengaruhi kondisi perekonomian mikro sehingga bukan membantu pertumbuhan ekonomi secara makro namun justru akan menimbulkan ketidakstabilan perekonomian.

#### **4.6 Kebijakan perikanan di Kabupaten Minahasa**

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi (dalam Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2011-2015)

1. Administrasi dan koordinasi pembangunan perikanan dan kelautan lintas daerah otonom selama ini dirasakan masih belum mantap dalam rangka pelaksanaan manajemen program dan kegiatan perikanan dan kelautan. Hal ini menyebabkan belum optimalnya hasil/produksi perikanan dan kelautan sesuai yang diharapkan
2. Masih rendahnya pertumbuhan dan distribusi kesejahteraan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya melalui pemberdayaan dan upaya pengentasan

kemiskinan dengan kegiatan ekonomi produktif, seperti penangkapan ikan, budidaya atau pengolahan hasil perikanan. Hal ini berkaitan dengan kondisi dimana sebagian besar nelayan, pembudidaya dan pengolahan hasil perikanan masih tradisional yang memang belum kondusif untuk membangun suatu kemajuan.

3. Masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia dalam menguasai teknologi kelautan dan perikanan; lemahnya peran kelembagaan untuk mendapatkan modal, teknologi, informasi dan posisi tawar dengan berbagai pihak yang terkait; terbatasnya jaringan usaha; rendahnya penguasaan IPTEK kelautan dan perikanan; belum memadainya prasarana dan sarana dalam mengembangkan usaha; lemahnya market intelligence yang meliputi penguasaan informasi tentang pesaing segmen pasar, dan selera para konsumen tentang jenis dan mutu komoditas perikanan; serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam sektor kelautan dan perikanan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi.
4. Masih rendahnya penyerapan tenaga kerja karena rendahnya penciptaan lapangan kerja yang baru pada sektor kelautan dan perikanan dimana terkait dengan rendahnya penyediaan modal usaha; rendahnya jumlah tenaga yang terampil; sedikitnya informasi pasar dan lemahnya jaringan pemasaran.
5. Masih rendahnya kepedulian masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan daya dukung di lingkungan perairan tawar, pesisir, pulau-pulau kecil dan lautan. Demikian pula terkait dengan adanya kerusakan hutan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun, adanya pencemaran di laut, terjadinya penambangan karang dan pasir di laut yang tidak ramah lingkungan, serta adanya proyek *illegal, unregulated and unreported fishing (IUU fishing)* dimana tidak didukung oleh *law reinforcement* yang kuat.

#### 4.6.1 Rencana Strategi

##### Kebijakan :

1. Peningkatan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan dan masyarakat pesisir lainnya.
2. Pengembangan usaha perikanan tangkap secara efisien, lestari dan berbasis kerakyatan .
3. Percepatan pengembangan usaha perikanan budidaya yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan melalui pembangunan dan pengembangan prasaranan dan sarana yang memadai.
4. Peningkatan mutu dan nilai tambah hasil perikanan baik melalui pengembangan industri pengolahan skala besar maupun industri rumah tangga dalam bentuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM) dalam rangka memperkuat industri kelautan dan perikanan.
5. Peningkatan pengolahan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat berdasarkan daya dukung lingkungannya.
6. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola sumberdaya kelautan dan perikanan.
7. Peningkatan pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara tertib, bertanggung jawab dan berkelanjutan, termasuk penanggulangan *illegal fishing*.
8. Pengembangan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional guna memperkuat kualitas dan kuantitas SDM kelautan dan perikanan.
9. Peningkatan efisien dan efektivitas kinerja pemerintah di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Utara dalam rangka mewujudkan aparatur yang produktif, profesional, bersih, transparan dan bertanggung jawab.

10. Peningkatan dukungan, koordinasi dan pembinaan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Utara.
11. Pengembangan jaringan kemitraan usaha perikanan antar pelaku sektor kelautan dan perikanan.
12. Pengembangan kerjasama antar kabupaten/kota/provinsi, regional dan internasional bagi sektor kelautan dan perikanan.
13. Pengembangan riset dan IPTEK kelautan dan perikanan.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 28 November 2011 menyatakan bahwa:

Sektor perikanan di Minahasa Utara, khususnya pengembangan daerah pesisir, saat ini kita kembangkan ke arah konsep minawisata. Yaitu perikanan digabungkan dengan sektor pariwisata. Hal ini telah dilakukan di Pulau Gangga seperti pemanfaatan kulit kerang sebagai *souvenir*. Selain itu sudah dibuat beberapa DPL sebagai daerah otonomi masyarakat nelayan sehingga investor tetap pada koridor konservasi dalam pengembangan wisata. Tapi hal ini belum optimal karena terkadang masyarakat sendiri juga melanggarnya pada salah satu DPL di wilayah Pulau Gangga. Sedangkan untuk Pulau Bangka khususnya Desa Lihunu kami masih dalam tahap awal untuk masuknya program ini.

Dari observasi dan analisis data di lapang ditemukan bahwa selama ini pengembangan perikanan yang telah berjalan adalah dengan mengarahkan kegiatan melaut untuk menyediakan jasa wisata, salah satunya adalah jasa perahu pengantar untuk wisata *diving*, bukan lagi hanya digunakan untuk kegiatan penangkapan dan budidaya. Masyarakat secara tidak langsung telah berorientasi pada usaha wisata. Mereka beranggapan bahwa dengan biaya operasional yang lebih kurang sama untuk kegiatan penangkapan, lebih cenderung menggunakan perahu-perahunya untuk menyediakan jasa wisata kepada wisatawan yang akan melakukan kegiatan *diving* yang hal ini diakui oleh mereka dapat menghemat tenaga untuk beraktivitas lain.

Hasil analisis dalam mengkaji kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam penelitian ini ditemukan bahwa kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah masih banyak berorientasi pada masalah fisik atau kenampakan lokasi pariwisata kurang melihat secara mendalam bagaimana kemampuan sumber daya manusianya. Kebijakan yang dituangkan dalam bentuk bagan renstra dan programnya yang dijalankan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Utara sudah melibatkan masyarakat lokal sebagai pemilik dan pengelola dari semua potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan pada sektor pariwisata di Pulau Bangka (meliputi, baik Desa Lihunu, Kahuku, maupun Libas), namun hal ini belum secara optimal. Seperti peningkatan keterampilan (*softskill*) dalam membuat kerajinan sebagai salah satu produk wisata, belum menyentuh Desa Lihunu yang memiliki potensi sumber daya cukup besar.

#### **4.6.2 Program Dinas dan Instansi Terkait**

Instansi atau dinas yang berkaitan langsung dengan pengembangan pariwisata di wilayah pesisir Desa Lihunu adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Utara. Seiring dan sejalan dengan rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2011-2015, dalam program kerja Disbudpar Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2009-2014 menyatakan visi sebagai berikut. Yaitu menjadikan Minahasa Utara yang memiliki pesona alam, seni dan budaya sebagai daerah tujuan wisata utama di kawasan nusantara dan dunia.

Selain itu pula, dijelaskan arahan program dinas yang tertuang dalam misi program Disbudpar Kabupaten Minahasa Utara yaitu :

1. Merencanakan pengembangan kawasan pariwisata yang mendorong terciptanya sentra-sentra usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat,

2. memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja di Minahasa Utara,
3. meningkatkan kuantitas dan kualitas pariwisata Kabupaten Minahasa Utara sebagai tujuan wisata utama di wilayah Sulawesi Utara,
4. meningkatkan mutu, strategi pemasaran dan promosi pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri dengan menggunakan seluruh potensi masyarakat pariwisata untuk berpartisipasi secara aktif dan melibatkan pihak swasta sebagai pelaku bisnis dan pemilik modal,
5. menciptakan peluang pola mitra dengan pihak swasta dan masyarakat untuk membangun prakarsa dan partisipatif mengelola usaha pariwisata di Kabupaten Minahasa Utara,
6. meningkatkan sumberdaya aparatur di bidang pariwisata,
7. dan menyiapkan produk-produk hukum sebagai jaminan kepastian hukum masyarakat pelaku pariwisata.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 28 November 2011 menyatakan bahwa:

Untuk saat ini dikembangkan pada investor karena potensi pantai dan *diving* bawah lautnya maka cenderung diarahkan produk-produk ke sektor wisata bahari. Disana ada beberapa *resort* yang dikelola pihak asing yang lebih intens untuk lingkungan, pelestarian karang. Ada satu *resort* yang bekerja sama dengan masyarakat untuk melestarikan karang. Karena daerah Pulau Bangka termasuk dalam zona penyangga dari Bunaken. Kalau untuk membuat pariwisata disana selalu mengandalkan lingkungan. Tidak bisa untuk usaha-usaha lain seperti hotel yang dapat merusak lingkungan, sementara ini investor hanya berupa *resort-resort*.

Dalam UU Kepariwisata No. 10 tahun 2009 menyatakan bahwa penetapan kawasan strategis pariwisata dilakukan dengan memperhatikan aspek:

- a. sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
- b. potensi pasar;

- c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
- d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
- f. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
- g. kekhususan dari wilayah

Dari hasil analisis dalam kesesuaian Desa Lihunu untuk dikembangkan pada sektor pariwisata khususnya wisata bahari, menunjukkan bahwa lokasi tersebut sangat sesuai seperti yang tersebut dalam UU Kepariwisata No. 10 tahun 2009. Desa Lihunu memiliki sumber daya pariwisata meliputi sumber daya alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata. Hal ini yang menjadikan pula memiliki potensi pasar dalam bidang pariwisata. Selain itu, lokasi strategis yang berada pada perairan tenang Laut Sulawesi, berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah karena semakin sering didatangi pengunjung yang akan mengetahui wilayah ini sebagai wilayah Indonesia. Perairan dan daratan Desa Lihunu juga merupakan daerah perlindungan yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, yaitu sebagai penyangga dari wilayah perairan Taman Laut Nasional Bunaken, selain termasuk lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya (*local knowledge*) seperti pesta adat Tulude dan Masamper yang hanya terdapat di wilayah Pulau Bangka. Namun kembali kesiapan dan dukungan masyarakat yang menjadi kendala dalam pengembangan wilayah pesisir Desa Lihunu ini khususnya ke arah sektor perikanan-pariwisata (wisata bahari) .

Sedangkan mengkaji kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam penelitian ini ditemukan bahwa kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah masih banyak berorientasi pada masalah fisik atau kenampakan lokasi pariwisata tanpa melihat secara mendalam bagaimana kemampuan sumber daya manusianya. Kebijakan yang dituangkan dalam bentuk bagan renstra dan programnya yang dijalankan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Utara ternyata belum secara langsung berpihak dan melibatkan masyarakat lokal yang sebenarnya adalah pemilik dan pengelola dari semua potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan pada sektor pariwisata di Pulau Bangka (meliputi, baik Desa Lihunu, Kahuku, maupun Libas).

Kemudian belum adanya peraturan daerah (Perda) yang secara jelas mengatur tentang pengelolaan wisata berbasis masyarakat yang menjadi acuan dan mengarahkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sangat berpengaruh pada masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan wisata. Meskipun dalam bagan renstra dituangkan bahwa terdapat rencana program untuk meningkatkan kualitas pengelolaan wisata, namun pada kenyataannya hal tersebut belum dilakukan secara intensif dan lebih terfokus pada pembangunan fisik.

Kebijakan dari pemerintah yang sudah ada cenderung terkonsentrasi pada objek-objek wisata yang sudah dikenal oleh wisatawan secara luas, seperti objek wisata Bunaken. Kemudian karena objek wisata tersebut sudah lama dikembangkan dengan infrastruktur yang memadai, maka secara kualitas dapat dinyatakan bahwa masyarakat di sekitar objek wisata tersebut sudah memiliki peran serta yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat Pulau Bangka. Jadi, pengembangan disini dimaksudkan bukan untuk eksploitasi sumber daya alam untuk pengembangan wisata semata tetapi lebih pada tujuan meningkatkan

peran serta masyarakat dalam pengelolaannya. Dengan terlibatnya masyarakat secara langsung dengan diimbangi peningkatan kualitas sumber daya manusia maka masyarakat tentunya secara langsung dan berkesinambungan akan menjaga kelestarian wilayahnya tanpa adanya perintah atau himbuan dari pemerintah terkait.

#### 4.7 Faktor Pendukung dan Penghambat

Dari analisis data yang diperoleh pada penelitian di Desa Lihunu dapat diambil beberapa faktor yang mendukung maupun penghambat, yang tentunya akan menjadi masukan dan koreksi untuk *stakeholders* terkait yang ada di daerah, dalam menentukan kebijakan pengelolaan pesisir oleh masyarakat lokal.

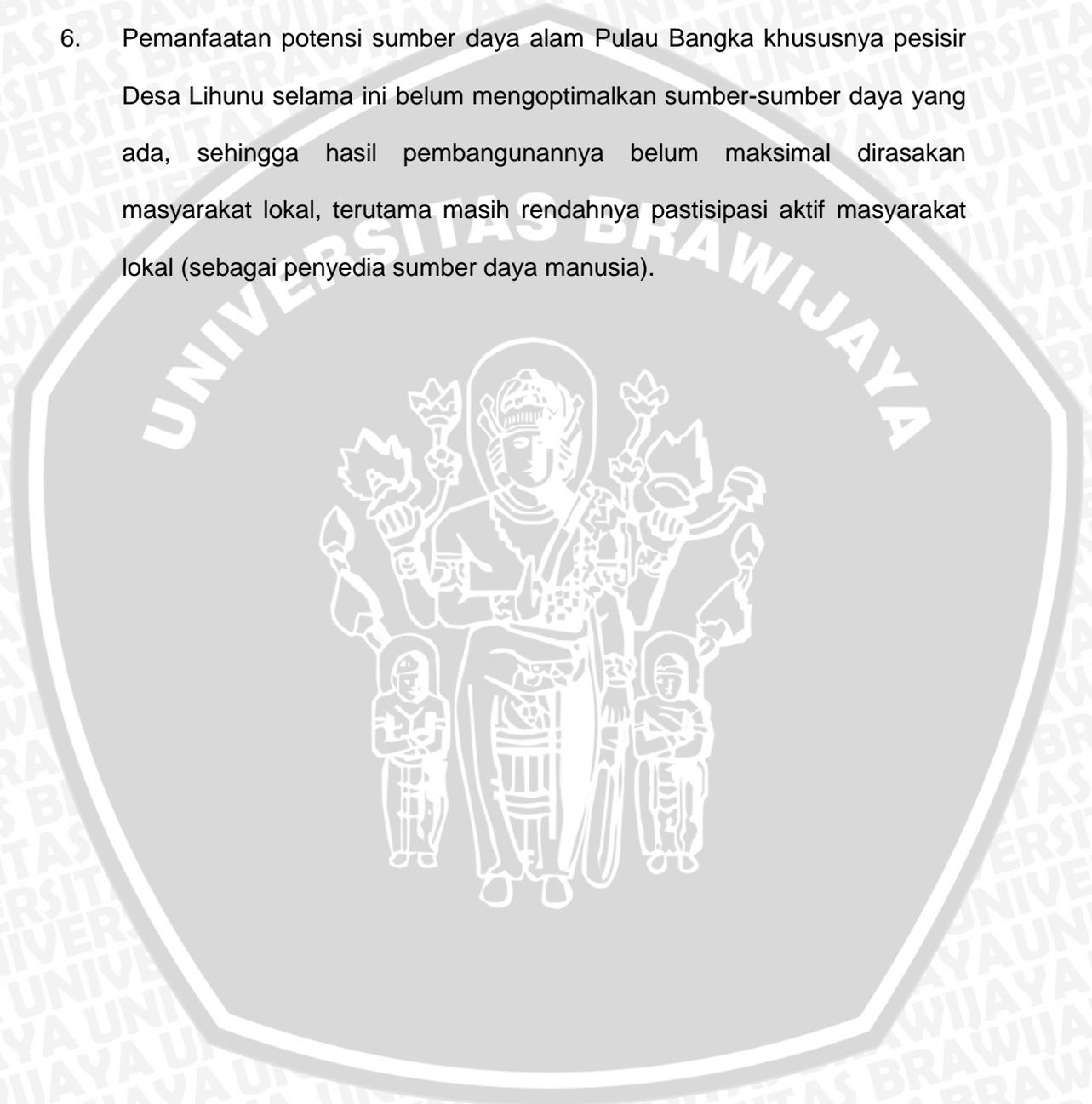
Faktor pendukung tersebut antara lain :

1. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.67/UM.001/MKP/2004 tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata di Pulau-Pulau Kecil.
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan di daerah.
4. Sumber daya alam dan sumber daya manusia yang cukup besar yang belum dimanfaatkan secara optimal.
5. Tersedianya sarana dan prasarana yang telah ada sebagai hasil pembangunan yang dilaksanakan selama ini.

Sedangkan faktor-faktor penghambat antara lain:

1. Belum adanya sinkronisasi menyangkut Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.67/UM.001/MKP/2004 tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata di Pulau-Pulau Kecil dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan dengan otonomi daerah pemerintahan di daerah.
2. Masih sangat terbatasnya sarana dan prasarana pariwisata.

3. Belum optimalnya tugas pokok dan fungsi kelembagaan pemerintah.
4. Kualitas sumber daya manusia yang belum optimal dan maksimal terutama pada sektor pariwisata.
5. Masih lemahnya sistem kepariwisataan.
6. Pemanfaatan potensi sumber daya alam Pulau Bangka khususnya pesisir Desa Lihunu selama ini belum mengoptimalkan sumber-sumber daya yang ada, sehingga hasil pembangunannya belum maksimal dirasakan masyarakat lokal, terutama masih rendahnya partisipasi aktif masyarakat lokal (sebagai penyedia sumber daya manusia).



## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Turunnya Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2004 berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Desa Lihunu, menjadi lebih baik secara ekonomi, sosial, serta budaya masyarakat.
2. Pengembangan perikanan di Desa Lihunu dilakukan dengan pengelolaan melalui konsep kepariwisataan, yaitu kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan tidak hanya dengan penangkapan dan budidaya, tetapi lebih diarahkan pada kegiatan menjual jasa untuk wisata menyelam (*diving*).
3. Kuantitas sumber daya manusia, serta program-program instansi terkait menjadi daya dukung dalam pengembangan perikanan dengan konsep pariwisata (*minawisata*). Sedangkan rendahnya kualitas sumber daya manusia terutama minimnya keterampilan yang dimiliki masyarakat lokal, menjadi faktor penghambat belum dapat berjalannya pengembangan potensi-potensi pesisir yang terdapat di Desa Lihunu.

### 5.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan dari penelitian ini adalah:

1. Perlu adanya pengarahannya pengembangan dengan kombinasi sektor perikanan dan pariwisata, yang akan membawa perubahan baik dari segi sosial maupun ekonomi dan dapat menambah penghasilan daerah yang berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
2. Perlu melibatkan masyarakat secara langsung dan berkelanjutan dalam program peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri, mulai dari

- perencanaan, pengorganisasian, hingga pelaksanaannya sehingga terlatih dari dalam masyarakat sendiri untuk mengaktualisasikan kemampuannya.
3. Diperlukannya program nyata dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang belum optimal dan maksimal terutama pada sektor pariwisata, dengan cara memberikan pelatihan keterampilan dan mempermudah akses pendidikan formal yang dilakukan oleh instansi terkait, seperti DKP dan Disbudpar secara langsung.
  4. Perlu adanya sinkronisasi Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata di Pulau-Pulau Kecil dan undang-undang tentang kepariwisataan dengan otonomi daerah yang harus dilakukan oleh lembaga pemerintahan di daerah.
  5. Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui dan menganalisa secara mendalam pada pemerintahan di daerah yang menyebabkan belum sinkronnya keputusan kementerian dengan peraturan di daerah, sehingga akan ditemukan solusi terbaik dalam penerapan keputusan kementerian pada daerah yang sangat berpotensi seperti di wilayah pesisir Desa Lihunu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous. 2004. *Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI, Nomor: KM.67/UM.001/MKP/2004 tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata di Pulau-Pulau Kecil*. <http://www.legalitas.org>. Diakses pada tanggal 3 November 2011
- \_\_\_\_\_. 2009. *Minahasa Utara Dalam Angka 2009*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Utara. Airmandidi
- \_\_\_\_\_. 2010. *Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan*. Cet. I. Sinar Grafika. Jakarta
- Andriati, R. 2008. Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik. *Relasi Kekuasaan Suami dan Isteri pada Masyarakat Nelayan* 1 (1) : 50-58
- Hamzah, Awaluddin, N.K. Pandjaitan, dan N.W. Prasodjo. 2008. Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia. *Respon Komunitas Nelayan terhadap Modernisasi Perikanan* 2 (2)
- Kinseng, R. A. 2007. Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia. *Konflik-Konflik Sumberdaya Alam di Kalangan Nelayan di Indonesia* 1 (1)
- Kuncoro, M. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Erlangga. Jakarta
- Kusnadi, 2010. *Kebudayaan Masyarakat Nelayan*. Prosiding Seminar Jelajah Budaya 2010 di Yogyakarta tanggal 12-15 Juli 2010. Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
- Kusumo, A.T. Satriyo. 2010. Jurnal Dinamika Hukum. *Optimalisasi Pengelolaan dan Pemberdayaan Pulau-Pulau Terluar dalam Rangka Mempertahankan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia* 10 (3): 320-322
- Mawardi, Ikhwanuddin. 2007. *Pesisir & Lautan. Urgensi Keterpaduan Lintas Sektor dan Daerah dalam Pengembangan dan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil* 8 (1): 8-16
- Moleong, L.J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remadja Rosda Karya. Bandung
- Moeis, Syarif. 2008. *Adaptasi Ekologi Masyarakat Pesisir Selatan Jawa Barat Suatu Analisa Kebudayaan*. Prosiding Diskusi Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI Bandung di Bandung 2008. FPIPS UPI Bandung
- Nasution, Zahri. 2008. Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia. *Perkembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan Perairan Umum "Lebak Lebung"* 2 (2)
- Nijikuluw, Victor P. H. 2001. *Populasi dan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir seta Strategi Pemberdayaan Mereka dalam Konteks Pengelolaan*

Sumberdaya Pesisir Secara Terpadu. Prosiding Pelatihan Pengelolaan Pesisir Terpadu di Bogor, 29 Oktober 2001. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor (IPB)

Pangemanan, Pankie N.L., J. Luntungan, J. Waworuntu, dan H. Pangkey. 2002. Profil Pariwisata Pesisir Kabupaten Minahasa, Kota Manado dan Kota Bitung, Sulawesi Utara. Program Pengelolaan Sumberdaya Alam (NRM) USAID-BAPPENAS dan USAID-CRC/URI Pengelolaan Sumberdaya Pesisir (CRMP). Jakarta. 19 hlm.

Putra, D.Y. 2011. Peran Sektor Perikanan dalam Perekonomian dan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia: Analisis *Input-Output*. Program Pascasarjana. Universitas Andalas. 93 hlm.

Samsudin, Sadili. 2009. Manajemen Sumber daya Manusia. Pustaka setia. Bandung. 332 hlm.

Soekanto, Soerjono. 2003. Sosiologi Suatu Pengantar. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 466 hlm.

Susilo, Edi. 2010. Dinamika, Struktur Sosial dalam Ekosistem Pesisir. UB Press. Malang. 222 hlm.

Tantu, A. Gusti. 2011. *Analisis Dinamika Spasial dan Kesesuaian Lahan untuk Pemanfaatan Sumberdaya Alam Pesisir yang Berkelanjutan (Studi kasus di Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan)*. 50 hlm. (tidak diterbitkan)

Winata, Adi. 2010. Jurnal Matematika, Sains, dan Teknologi. *Peran Masyarakat Pesisir dalam Penerapan Strategi Konservasi Sumberdaya Laut (Kasus di Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi)*. , 11 (2): 122-132

Yin, Robert K. 2011. Studi Kasus Desain & Metode. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 218 hlm.

## Lampiran 1. Pedoman Pengumpulan Data Lapang

**TUJUAN**

1. Menganalisis potensi sumber daya Desa Lihunu Pulau Bangka, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara.
2. Menganalisis pengaruh turunnya Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. KM 67/UM 001/MKP/2004 terhadap keseharian masyarakat Desa Lihunu Pulau Bangka, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara.
3. Menganalisis kebijakan perikanan di Kabupaten Minahasa Utara untuk menjawab tujuan bagaimana pengembangan dan pengelolaan perikanan di Desa Lihunu Pulau Bangka, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara.
4. Menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat usaha pengelolaan sumber daya pesisir yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lihunu Pulau Bangka, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara.

**DRAFT PANDUAN LAPANG**

Tujuan	Variabel	Atribut	Teknik Pengumpulan Data
1. Menganalisis potensi sumber daya Desa Lihunu Pulau Bangka, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara.	Potensi alam/fisik	-Kondisi pantai dan pasir -Kondisi air dan ombak -Kondisi karang bebatuan -Kondisi flora dan fauna	Observasi dan wawancara
	Potensi sumber daya manusia	-Kemampuan masyarakat dalam berusaha -Tingkat pendidikan masyarakat	Observasi dan wawancara
2. Menganalisis pengaruh turunnya Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. KM 67/UM 001/MKP/2004 terhadap keseharian masyarakat Desa Lihunu Pulau Bangka, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara.	Status dan peran	Kedudukan individu dalam kelompok atau kelompok dengan kelompok lain dalam struktur masyarakat	Obsevasi, wawancara, dan data sekunder
	Potensi budaya dan seni	-Daya tarik dan keunikan -Siklus penampilan -Keterkaitan dengan religi atau mitos	
	Cakupan usaha	Jenis-jenis usaha perikanan yang dilakukan	

	Sistem usaha yang digunakan	Aturan-aturan yang dipakai pelaksanaan perikanan	yang dalam usaha	
3. Kebijakan perikanan di Kabupaten Minahasa Utara.	Rencana strategis	Kebijakan-kebijakan yang akan diberlakukan	yang	Pengumpulan data sekunder
	Program	Kebijakan-kebijakan yang telah diberlakukan yang sesuai dengan rencana strategis	yang	
4. Faktor pendukung dan penghambat pengelolaan perikanan	Peluang dan ancaman dalam pengelolaan perikanan	Peluang yang dikembangkan ancaman yang dimimalisir	dapat dan harus	Observasi, wawancara, dan pengumpulan data sekunder



## Lampiran 2. Kerangka Acuan Wawancara

**1. Keadaan umum lokasi (observasi dan data pendukung yang ada)**

- a. Jarak lokasi dengan jalan raya
  - Dari jalan provinsi
  - Dari jalan daerah/pusat kota/kecamatan
- b. Sejarah singkat Pulau Bangka (wawancara)
  - Bagaimana sejarah penduduk yang bermukim di Pulau Bangka
  - Bagaimana sistem pemerintahan
  - Adakan sistem formal?sejak kapan?
  - Apa tujuan dibentuk sistem formal?
  - Bagaimana keadaan sebelum dan sesudah sistem formal?
- c. Keadaan jalan dan transportasi (observasi dan wawancara)
  - Kondisi jalan
    - Usia
    - Tekstur
    - Panjang jalan (dalam wilayah tersebut)
  - Sarana transportasi yang ada

**2. Potensi wisata (observasi)**

- a. Potensi alam/fisik
  - Kondisi pantai dan pasir
  - Kondisi air dan ombak
    - Bagaimana pasang surut
    - Bagaimana pengaruh energi
    - Bagaimana musim melaut/wisata
  - Kondisi karang bebatuan
  - Kondisi flora dan fauna
- b. Potensi budaya/seni (wawancara)
  - Daya tarik dan keunikan
    - Tujuan
    - Fungsi
  - Siklus dan durasi penampilan
  - Keterkaitan dengan religi atau mitos – sejarah

**3. Pelaku usaha wisata dan pengguna jasa wisata**

- a. Status (contoh: hukum tua, pejabat desa, dsb.)
  - Kedudukan individu dalam kelompok
  - Kedudukan kelompok dengan yang lain
  - Kedudukan individu dan kelompok dalam struktur masyarakat
- b. Peran (wawancara)
  - Seperti apa pejabat desa
  - Seperti apa masyarakat biasa
  - Seperti apa masyarakat pemerintah
- c. Cakupan usaha
  - Jenis usaha di bidang pariwisata (usaha wisata)

- d. Sistem usaha  
Aturan yang dipakai dalam usaha wisata (menurut UU, menurut hukum adat, atau?)
- e. Pengguna jasa wisata  
Siapa saja wisatawan
- f. Partisipasi masyarakat  
Bagaimana masyarakat terlibat?

**4. Kebijakan pariwisata Kabupaten Minahasa Utara**

- a. Aturan  
UU mana yang dipakai? nomor.... tahun.....?
- b. Alasan
- c. Tujuan
- d. Manfaat bagi Kabupaten Minahasa Utara

**5. Pengembangan wisata berbasis masyarakat**

- a. Peluang bekerja dan melakukan usaha
  - Dilihat dari potensi SDA bagaimana?
  - Dilihat dari potensi SDM bagaimana?
- b. Peluang akses pada wisata
  - Ditinjau dari sumber daya pendukung (jalan, penerangan, bangunan penginapan, transportasi, kondisi alam/cuaca, hujan, angin, dsb.)



## Lampiran 3. Contoh Hasil Wawancara

Nama : Ulva

Tanggal : 24 November 2011

PERTANYAAN	JAWABAN	KETERANGAN
<p>Kan penelitian saya ini ada 4 tujuan,, ini kan tujuan..menganalisis peran serta... nah ini yang minta pendapat ibu,,</p>	<p>iya..iya pak,, kalo menurut saya.. saya awal pertama datang kesini,, saya sudah langsung dengan masyarakat,,saya orang baru kan??saya tidak tau jadi yang langsung saya libatkan awal itu orang-orang desa... Pendekatan saya pertama waktu itu..kan disini di kampung ada 6 gereja,, bekerja sama dengan jemaat...gantian datang bantu baku bersih dank,, itu yang bisa kita libatkan,, untuk tenaga kerja berusaha mengambil sebanyak mungkin saya libatkan karena satu keuntungannya mereka yg paling dekat...</p>	
<p>kemaren juga sudah terungkap itu,, untuk guide aja kan butuh kemampuan berbahasa inggris</p>	<p>he'eh.. sampai saat ini masih sementara mencari untuk orang bekerja di restoran masih training,, ada terus kan karena... Bukan cuma makanannya,, tapi kan harus bisa ngobrol,melayani tamu...ini masak apa?setidaknya ini masakan ini,,kan kita pake makanan tradisional,, itu yang perlu biasa kami jelaskan kasi training,, saya biasanya ke karyawan kasi pelatihan bahasa inggris..</p>	
<p>Lalu bagaimana merka sendiri??? Motivasi atau apa begitu</p>	<p>Sa bilang ee ga usah takut namanya tamu juga pasti akan mengerti???kalo baru belajar... malah mereka akan senang kalo kita mau mencoba,, tapi ya biasalah itu sa pikir perlu waktu untuk berani juga... kalo sa liat sih peran serta masyarakat bisa diperankan, digali...,, cuma ya itu ada hal-hal yang tenaga teknis yang tidak bisa... jadi terpaksa cari dari luar,, sementara ini sa masih kosong untuk manajer di resort..karena nda ada yang bisa dipake</p>	
<p>Sebenarnya masyarakat kritis-kritis... nah ini juga ada renstra,,bagus sekali ... tapi buat apa hanya renstra???</p>	<p>sebenarnya di pariwisata kan bnyak pelatihan?bisa bekerja sama dengan perindustrian... mimpinya kami seperti ini... klo ada durian runtuh (hehe..) mau beli untuk kasi jadi konservasi???mau perlindungannya itu yang penting sekali.... kaya seperti ini tidak punya perlindungani??dengan mudahnya pemerintah tidak berpikir ke depan...</p>	

